

LAPORAN RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

RIFASKES 2019

INDIKATOR UTAMA



LAPORAN

RISET FASILITAS KESEHATAN

INDIKATOR UTAMA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2019**

TIM PENYUSUN

Kontributor Utama

Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
Yuyun Yuniar, S.Si, Apt, MA
Mujjati, SKM, M.Kes
Rani Marsini, SKM
Dr. Feri Ahmadi, S.Si, MPH
dr. Roy G.A Massie, MPH, PhD
Dr. Gurendro Putro, SKM., M.Kes
Noor Edi Widya Sukoco, MPS., M.Sc.PH
dr. Sri Mardikani Nugraha, MKM
Agus Dwi Harso, S.Si
dr. Anton Suryatma, MKM
Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
Dra. Marice Sihombing, M.Si
drg. Lelly Andayasari, M.Kes
dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.OK
Anggita Bunga Anggraini, S.Farm., Apt., MKM
Ida Diana Sari, S.Si., Apt., MPH
Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
Ina Kusriani, SKM, MKM
Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
Antonius Yudi Kristanto, S.Sos, MKM
Olwin Nainggolan, S.Si, MKM
Wening Wijayanti, SKM
Meiske Elisabeth Koraag, S.Si
M. Bakti Samsu Adi, S.Si, M.Si
Mara Ipa, SKM, M.Sc
Zainul Khaqiqi N, S.Si
Astridya Paramitha, SKM, M.Kes

Kontributor Anggota

dr. Muhammad Karyana, M.Kes
Dr. Lukman Waris, SKM., MMR., M.Kes
Heny Lestary, SKM, MKM
Aris Yulianto, S.Si
Desi Fitriani, SKM, M.Si
Sundari Wirasmi, S.Si
Enung Nurhotimah, SKM, MKM
Meda Permana, S.Sos., M.Si
Dr. Miko Hananto, SKM, M.Kes
Sundari Wirasmi, S.Si
Dr. Miko Hananto, SKM, MKes
Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes
Asep Hermawan, S.Kep., Ners
Syachroni, S.Si, M.Kes
dr. Fitriana, Sp.MK
Dr. dr. Telly Purnamasari A, M.Epid
dr. Made Dewi Susilawati, M.Epid
dr. Srilaning Driyah, SpPK, M.Si. Med
dr. Eva Sulistiowati, M.Biomed
Dr. dr. Laurentia Konadi, MS., Sp.GK
dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi

drh. Risqa Novita, MKM
dr. Rossa Avrina, M.Epid
dr. Hadjar Siswantoro, MSc
Drs. Max Josep Herman, M.Kes
Dra. Rini Sasanti Handayani, Apt., M.Kes
Nita Prihartini, SKM
Dra. Retno Gitawati, Apt., MS
Bryan Mario Isakh, SKM, MKM
drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS
dr. Tita Rosita, MKM
dr. Cicuh Opitasaki, MARS
dr. Retna Mustika Indah, MKM
Mimi Sumiarsih, SKM, MKM Dwi Hapsari
Andi Leny Susyanty, S.Si., Apt, MKM
dr. Idawaty Muas, MKM
Tri Wurisastuti, S.Stat
Nur Rahmawati Wijaya, SKM
Made Agus Nurjana, SKM, M.Epid
Merry Budiarti S, M.Sc
Yuniarti Suryatinah, S.Farm, Apt
Dwi Priyanto, S.Si, M.Si
Nur Sholihatin, S.Sos
Khadijah Azhar, SKM, MKM
Mutiar Widawati, S.Si
Zumrotus Solichah, SKM
Amir Su'udi, SKM, MKM
Dr. Nurhayati, SKM, MKM
Rianto Purnama, S.Kom
Totih Ratna Sondari Setiadi, SKM
Djunaedi, SKM
Yusup, S.Kom
Narendro Arifia, S.Kom
Lusi Kristiana, S.Si, Apt, Mkes
Melda S Suebu, S.Si
Windarti Fauziah, S.Si
Lely Indrawati, S.Sos, MKM
Ritawati, S.Si
Rika Mayasari, S.Si
Akhmad Wahyudin, SKM
Milana Salim, M.Sc
Revi Rosavika Kinansi, S.Si
Puti Sari Hidayangsih, SKM, MSc.Ph
Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si

**Cara Sitasi: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 2019.
Laporan Indikator Utama Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah robbil'aalamiin, puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019. Riset ini merupakan salah satu Riset Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan.

Dalam satu dasawarsa terakhir, Badan Litbangkes melalui pendekatan *Client Oriented Reseach Approach* (CORA) yang diaplikasikan melalui berbagai penelitian, semakin mengukuhkan perannya sebagai suatu institusi penelitian dan pengembangan kesehatan yang secara aktif berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Kesehatan dalam menghasilkan data dan masukan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

Penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 memerlukan asupan dari hasil penelitian kesehatan yang diyakini kesahihan datanya. Rifaskes 2019: Riset Evaluatif JKN telah mengumpulkan data dari seluruh puskesmas (*total coverage*), dinas kesehatan kabupaten/kota (*total coverage*), RS (*sampling*), serta praktik mandiri dokter, klinik, praktik mandiri bidan, laboratorium klinik mandiri, dan apotek (*sampling*). Data yang diambil selain data perbandingan (*benchmark*) dengan Rifaskes 2011, juga data lain terkait indikator RPJMN 2020-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Semoga hasil Rifaskes 2019 yang berisi indikator-indikator utama ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Billahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 2019
Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan



dr. Siswanto, MHP., DTM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Indikator RPJMN	1
1.2. Indikator Rencana Strategis Kemenkes	3
BAB II DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN	6
2.1. Indikator RPJMN 2020-2024	6
2.2. Indikator Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024	17
BAB III HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR UTAMA	29
3.1 Indikator RPJMN 2020-2024	29
3.2 Indikator Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024	46
Lampiran	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Indikator RPJMN 2020-2024	2
Tabel 1. 2	Indikator Rencana Strategis Kemenkes	3
Tabel 2. 1	Standar Ketenagaan Puskesmas menurut Permenkes No. 75 tahun 2014.....	8
Tabel 2. 2	Pertanyaan Jumlah Dokter di Kuesioner Puskesmas Blok VIII	10
Tabel 2. 3	Jenis obat dan vaksin indikator 2015-2019.....	11
Tabel 2. 4	Daftar Obat Esensial Indikator 2020-2024 (40 obat).....	13
Tabel 2. 5	Daftar 35 Obat Esensial Indikator 2020-2024 yang Terdapat di Kuesioner Rifaskes 2019	14
Tabel 2. 6	Standar ketenagaan di klinik pratama menurut Permenkes No. 9 tahun 2014.....	16
Tabel 2. 7	Standar ketenagaan di klinik utama menurut Permenkes No.9 tahun 2014.....	16
Tabel 2. 8	Standar ketenagaan di klinik utama (pelayanan gigi) menurut Permenkes No.9 tahun 2014.....	16
Tabel 2. 9	Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja di Kuesioner Rifaskes 2019	17
Tabel 2. 10	Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kesehatan Kerja Internal di Kuesioner Rifaskes 2019	18
Tabel 2. 11	Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kesehatan Kerja Eksternal di Kuesioner Rifaskes 2019	18
Tabel 2. 12	Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja di Kuesioner Rifaskes 2019	20
Tabel 2. 13	Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Pelaksanaan Kesehatan Olah Raga Dalam Gedung Puskesmas di Kuesioner Rifaskes 2019.....	21
Tabel 2. 14	Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Pelaksanaan Kesehatan Olah Raga Luar Gedung Puskesmas di Kuesioner Rifaskes 2019.....	22
Tabel 3.1. 1	Proporsi Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan atau RS dalam Pelayanan Darah menurut Provinsi, Rifaskes 2019	29
Tabel 3.1. 2	Proporsi Puskesmas Mampu PONED berdasarkan Karakteristik Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	30
Tabel 3.1. 3	Proporsi Posyandu Aktif menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	31
Tabel 3.1. 5	Proporsi Kabupaten/kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap menurut Provinsi, Rifaskes 2019	32
Tabel 3.1. 6	Proporsi Kesesuaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Perkotaan berdasarkan Karakteristik Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019 ..	33
Tabel 3.1. 7	Proporsi Kesesuaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Perdesaan berdasarkan Karakteristik Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019 ..	34
Tabel 3.1. 8	Proporsi Kesesuaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil Berdasarkan Karakteristik Wilayah Menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	35
Tabel 3.1. 9	Proporsi Puskesmas Tanpa Dokter Berdasarkan Karakteristik Wilayah Menurut Provinsi, Rifaskes 2019	36
Tabel 3.1. 10	Proporsi Puskesmas Tanpa Dokter Menurut Karakteristik Wilayah Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019	37
Tabel 3.1. 11	Jumlah Puskesmas Terakreditasi menurut Provinsi, Rifaskes 2019....	38
Tabel 3.1. 12	Jumlah Klinik Terakreditasi menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	39

Tabel 3.1.13	Rerata Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Berdasarkan Kriteria Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019	39
Tabel 3.1. 14	Proporsi Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar menurut Provinsi, Rifaskes 2019	40
Tabel 3.1. 15	Rerata Persentase Puskesmas berdasarkan Karakteristik Wilayah yang Memiliki Ketersediaan Obat dan Vaksin Indikator (20 item), Rifaskes 2019.....	41
Tabel 3.1.16	Rerata Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Berdasarkan Kriteria Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019	42
Tabel 3.1. 17	Proporsi Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Berdasarkan Ketersediaan SK menurut Provinsi, Rifaskes 2019	43
Tabel 3.1. 18	Rerata Persentase Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah yang Memiliki Ketersediaan Obat Esensial (35 obat), Rifaskes 2019.....	44
Tabel 3.1. 19	Proporsi Klinik Sesuai Standar Ketenagaan di Klinik Pratama, Rifaskes 2019.....	45
Tabel 3.1. 20	Proporsi Klinik Sesuai Standar Ketenagaan di Klinik Utama, Rifaskes 2019.....	45
Tabel 3.1. 21	Proporsi Klinik Sesuai Standar Ketenagaan (Pelayanan Kedokteran Gigi) di Klinik Utama, Rifaskes 2019.....	45
Tabel 3.2.1	Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja menurut Provinsi, Rifaskes 2019	46
Tabel 3.2.2	Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga menurut Provinsi, Rifaskes 2019	47
Tabel 3.2.3	Proporsi Kabupaten/kota yang Melaksanakan Audit Maternal Perinatal/ AMP menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	48
Tabel 3.2.4	Proporsi Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin (Catin) menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	49
Tabel 3.2.5	Proporsi Puskesmas yang Melaksanakan MTBS menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	50
Tabel 3.2.6	Proporsi Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan untuk Mendukung Kearifan Budaya Masyarakat Hidup Sehat menurut Provinsi, Rifaskes 2019	51
Tabel 3.2.7	Proporsi Kabupaten/kota yang Memiliki Penetapan Tatanan Sehat dalam Menyelenggarakan Promosi Kesehatan untuk Meningkatkan PHBS Masyarakat menurut Provinsi, Rifaskes 2019	52
Tabel 3.2.8	Proporsi Kabupaten/kota yang Melakukan Kampanye Peningkatan Perilaku Hidup Sehat Melalui Media Elektronik, Non Elektronik, dan Media Sosial menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	53
Tabel 3.2.9	Kab/kota yang Memiliki Jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif menurut Provinsi, Rifaskes 2019	54
Tabel 3.2.10	Proporsi Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Promosi Kesehatan dan Memiliki Tenaga Promosi Kesehatan menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	55
Tabel 3.2.11	Proporsi Kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Surveillans Gizi menurut Provinsi, Rifaskes 2019	56
Tabel 3.2.12	Proporsi Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Gizi menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	57

Tabel 3.2.13	Distribusi Kabupaten/kota yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	58
Tabel 3.2.14	Distribusi Kabupaten/kota yang Memiliki 80% Desa Berposbindu menurut Provinsi, Rifaskes 2019	59
Tabel 3.2.15	Distribusi Puskesmas yang melakukan Pemeriksaan IVA menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	60
Tabel 3.2.16	Distribusi Kabupaten/kota yang Mempunyai Kebijakan Kekejarantinaan Kesehatan menurut Provinsi, Rifaskes 2019.....	61
Tabel 3.2.17	Proporsi Kabupaten/kota yang 10 % Puskesmasnya melaksanakan Upaya P2 Keswa dan Napza menurut Provinsi, Rifaskes 2019	62
Tabel 3.2.18	Proporsi Kabupaten/kota yang 20 % Puskesmasnya melaksanakan Upaya P2 Keswa dan Napza menurut Provinsi, Rifaskes 2019	63

BAB I PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini merupakan produk dari UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan amanat pasal 60 ayat (1) Undang-Undang BPJS, terhitung tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, antara lain menginstruksikan untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, terutama obat esensial, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, dan swasta.

1.1. Indikator RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Salah satu agenda tersebut yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian

penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing. Hasil Rifaskes 2019 dapat digunakan sebagai *baseline* indikator RPJMN 2020-2024.

Tabel 1. 1 Indikator RPJMN 2020-2024

No.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	KUESIONER
1.	Persentase puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah	Jumlah puskesmas yang bekerjasama dalam pelayanan darah dibagi total puskesmas dikali 100%	puskesmas
2.	Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil		TIDAK TERSEDIA
3.	Jumlah puskesmas PONED	Jumlah puskesmas mampu PONED/total puskesmas x100%	puskesmas
4.	Jumlah rumah tunggu kelahiran		TIDAK TERSEDIA
5.	Jumlah posyandu aktif	jumlah posyandu aktif/total posyandux100	puskesmas
7.	Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	Dinkes
8.	Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dibagi total puskesmas dikali 100%	Puskesmas
9.	Puskesmas tanpa dokter	Jumlah puskesmas tanpa dokter dibagi total puskesmas dikali 100%	Puskesmas
10.	Puskesmas dan klinik terakreditasi minimal utama	Jumlah puskesmas terakreditasi minimal utama dibagi total puskesmas	Puskesmas
11.	Klinik terakreditasi utama	Tidak tersedia karena akreditasi utama tidak ada	Klinik
12.	Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar	Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat/vaksin indikator	puskesmas
13.	Klinik dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Berdasarkan permenkes 46/2015	

1.2. Indikator Rencana Strategis Kemenkes

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020-2024 dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar berupa kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemenuhan pelayanan dasar itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain sebagai baseline indikator RPJMN 2020-2024, hasil Rifaskes 2019 juga dapat digunakan sebagai *baseline* indikator Renstra Kemenkes 2020-2024.

1.2.1. Indikator Kesehatan Masyarakat

- a. Kesehatan Kerja dan Olahraga
- b. Kesehatan Keluarga
- c. Promosi Kesehatan
- d. Gizi
- e. Kesehatan Lingkungan

1.2.2. Indikator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tabel 1. 2 Indikator Rencana Strategis Kemenkes

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	KUESIONER
Kesehatan Kerja dan Olahraga			
1	Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja adalah	kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan program kesehatan kerja dibagi total kab/kota	Dinkes
		jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 pos UKK	Dinkes
2	Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga	kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan program kesehatan olahraga dibagi total kab/kota	Dinkes
Kesehatan Keluarga			
3	Cakupan kab/kota melaksanakan AMP	jumlah kab/kota yang melaksanakan AMP	Dinkes
4	Cakupan PKM melaksanakan yankespro bagi catin	jumlah puskesmas yang melaksanakan 1 atau lebih program kespro catin/ total puskesmas	Puskesmas

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	KUESIONER
5	Cakupan PKM melaksanakan MTBS	puskesmas yang melaksanakan MTBS/total puskesmas di kabupaten puskesmas yang melaksanakan MTBS/total puskesmas	Dinkes Puskesmas
6	Cakupan PKM melaksanakan SDIDTK		Tidak Tersedia
7	Cakupan PKM menyelenggarakan kes usia sekolah dan remaja		Tidak Tersedia
8	Cakupan PKM melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas I dan VII		Tidak Tersedia
9	Cakupan PKM melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik kelas X		Tidak Tersedia
Promosi Kesehatan			
10	% Kab.Kota yang mengeluarkan Kebijakan yang mendukung Perilaku Sehat	kabupaten/kota yang punya kebijakan dibagi total kabupaten kota	Dinkes
11	% kab/kota yang memiliki tatanan sehat /ber PHBS	kabupaten/kota yang punya kebijakan dibagi total kabupaten kota	Dinkes
12	% Kab./Kota yang melaksanakan kampanye perilaku sehat	kabupaten/kota yang punya kebijakan dibagi total kabupaten kota	Dinkes
13	% desa/kelurahan siaga aktif	desa siaga aktif/ jumlah desa total di kab/kota	Dinkes
14	% Puskemas yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan Gizi	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan promosi kesehatan dibagi total puskesmas	Puskesmas
15	Kabupaten/kota menyelenggarakan surveilans gizi	Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan surveilans gizi	Dinkes
16	% Puskemas yang melaksanakan pemantauan pertumbuhan	jumlah puskesmas yang memiliki posyandu	Puskesmas
17	% puskesmas melaksanakan Proses Asuhan Gizi (PAG) Kesling	jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan gizi	Puskesmas
18	% Puskesmas yang menyelenggarakan pembinaan Kesehatan Lingkungan (TTU, TPM,	jumlah sarana yang diawasi (TTU, TPM, SAM)	Puskesmas

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	KUESIONER
	SAM Komunal, Limbah medis di Fasyankes dan B3/Merkuri)	puskesmas melakukan konseling kesling selama jam kerja	Puskesmas

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)

19	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penularan Hepatitis B dari ibu ke anak	deteksi dini melalui pemeriksaan HBsAg	Dinkes
20	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengendalian vektor terpadu		
21	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 80% desa berposbindu	1. jumlah desa yang melaksanakan posbindu/total desax100%---> cut off di 80% 2. jumlah kab/kota yang minimal 80% desa melaksanakan posbindu	Dinkes
		total desa memiliki posbindu dari seluruh puskesmas di kab/kota dibagi total desa di kab/kota	Puskesmas
22	Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Sadanis dan IVA	hanya tersedia data jumlah puskesmas yang melakukan tes IVA	Puskesmas
23	Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kekarantina kesehatan		Dinkes
24	Persentase kabupaten/kota yang memiliki peta risiko penyakit infeksi emerging	tidak ada	
25	Persentase kabupaten/kota yang 10 % puskesmasnya melaksanakan upaya P2 Keswa dan Napza	1. jumlah desa yang melaksanakan keswa napza/total desax100%---> cut off di 10% 2. jumlah kab/kota yang minimal 80% desa melaksanakan keswa napza	Puskesmas
26	Persentase kabupaten/kota yang 10% puskesmasnya melaksanakan surveilan Keswa dan Napza		

BAB II DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN

Definisi operasional dan cara penghitungan masing-masing indikator RPJMN dan renstra Kemenkes dalam Rifaskes 2019 adalah sebagai berikut:

2.1. Indikator RPJMN 2020-2024

1) Persentase puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah

Persentase puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah, yaitu Puskesmas memiliki kerjasama dengan unit transfusi darah dan atau rumah sakit.

$$= \frac{\text{Puskesmas memiliki kerjasama dengan unit transfusi darah dan atau rumah sakit} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. 36 kode 1 – 2)}}{\text{Total Puskesmas (menjawab pertanyaan blok III no. 36)}} \times 100\%$$

2) Jumlah puskesmas PONED

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas mampu poned (blok III no. 37 kode 1 – 2)} \\ \text{total}}{\text{Total Puskesmas}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas mampu poned (blok III no. 37 kode 1 – 2)} \\ \text{di perkotaan (blok III no. 6 kode 1)}}{\text{Total Puskesmas}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas mampu poned (blok III no. 37 kode 1 – 2)} \\ \text{di perdesaan (blok III no. 6 kode 2)}}{\text{Total Puskesmas}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas mampu poned (blok III no. 37 kode 1 – 2)} \\ \text{terpencil/Sangat Terpencil (blok III no. 6 kode 3)}}{\text{Total Puskesmas}} \times 100\%$$

Kuesioner Puskesmas Blok III No. 37

37	Apakah puskesmas mampu PONED? Ket: PONE D = Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar	1. Ya, dengan tim PONE D lengkap 2. Ya, dengan tim PONE D tidak lengkap 3. Tidak → P.40	<input type="checkbox"/>
----	--	---	--------------------------

3) Jumlah posyandu aktif

$$= \frac{\text{Jumlah posyandu aktif (menjawab pertanyaan blok III no. 17b)}}{\text{Jumlah posyandu (menjawab pertanyaan blok III no. 17a)}} \times 100\%$$

4) Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap

Imunisasi dasar rutin terdiri dari Bacillus Calmette Guerin (BCG), Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B (DPT-HB) atau Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib), Hepatitis B pada bayi baru lahir, Polio dan Campak (Kemenkes RI, 2013). Unit analisisnya yaitu kabupaten/kota.

Cara menghitung:

Recode: Blok IV no. 40 \geq 80% = 1 dan Blok IV no. 40 $<$ 80% = 0.

Nominator: Jumlah kabupaten/kota berkode 1

Denominator: jumlah kabupaten/kota sampel

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% IDL = jumlah kabupaten/kota yang mencapai IDL minimal 80% / total kabupaten kota x 100%

$$= \frac{\text{Kabupaten dengan imunisasi dasar lengkap kode 1 (menjawab pertanyaan blok IV no.40, recode kode 1)}}{\text{Jumlah dinkes per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.1)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Kabupaten dengan imunisasi dasar lengkap kode 2 (menjawab pertanyaan blok IV no.40, recode kode 2)}}{\text{Jumlah dinkes per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.1)}} \times 100\%$$

5) Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Standar ketenagaan merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Dalam penghitungan ketenagaan ini belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa. Standar ketenagaan puskesmas menurut Permenkes Nomor 75 tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Standar Ketenagaan Puskesmas menurut Permenkes No. 75 tahun 2014

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Puskesmas Perkotaan		Puskesmas Perdesaan		Puskesmas terpencil/sangat terpencil	
		Non rawat inap	Rawat inap	Non rawat inap	Rawat inap	Non rawat inap	Rawat inap
1	Dokter atau dokter layanan primer	1	2	1	2	1	2
2	Dokter gigi	1	1	1	1	1	1
3	Perawat	5	8	5	8	5	8
4	Bidan	4	7	4	7	4	7
5	Tenaga kefarmasian	1	2	1	1	1	1
6	Tenaga Kesehatan masyarakat	2	2	1	1	1	1
7	Tenaga kesehatan lingkungan	1	1	1	1	1	1
8	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1	1	1	1
9	Tenaga gizi	1	2	1	2	1	2
	TOTAL	22	31	19	27	19	27

Cara menghitung jumlah masing-masing tenaga:

- Dokter : Blok VIII no 8.1 b dan c
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.1 b dan c kolom 6
- Dokter Gigi : Blok VIII no 8.1 e
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.1 e kolom 6
- Perawat : Blok VIII no 8.3 kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.3 kolom 6
- Bidan : Blok VIII no 8.4 kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.4 kolom 6
- Farmasi : Blok VIII no 8.5 kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.5 kolom 6
- Kesmas : Blok VIII no 8.6 kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.6 kolom 6
- Kesling : Blok VIII no 8.7 kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.7 kolom 6
- Gizi : Blok VIII no 8.8 kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 8.8 kolom 6
- Analisis : Blok VIII no 11c kolom 6
Jumlah yang ada di Blok VIII no 11c kolom 6

Cara menghitung kesesuaian jumlah masing-masing tenaga:

Dokter:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

Dokter Gigi:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Perawat:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 5 , Rawat Inap ≥ 8

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 5 , Rawat Inap ≥ 8

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 5 , Rawat Inap ≥ 8

Bidan:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 4 , Rawat Inap ≥ 7

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 4 , Rawat Inap ≥ 7

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 4 , Rawat Inap ≥ 7

Farmasi:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Kesmas:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 2 , Rawat Inap ≥ 2

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Kesling:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Gizi:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 2

ATLM:

Perkotaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Perdesaan: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

Terpencil/sangat terpencil: Non Rawat Inap ≥ 1 , Rawat Inap ≥ 1

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas non rawat inap di kawasan perkotaan dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.6)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas rawat inap di kawasan perkotaan dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.6)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas non rawat inap di kawasan perdesaan dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.6)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas rawat inap di kawasan perdesaan dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.6)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas non rawat inap di kawasan terpencil/sangat terpencil dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.6)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas rawat inap di kawasan terpencil/sangat terpencil dengan tenaga kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah puskesmas per provinsi (menjawab pertanyaan blok III no.6)}} \times 100\%$$

6) Puskesmas tanpa dokter

Puskesmas dihitung dari puskesmas yang memiliki jumlah dokter umum dan atau dokter layanan primer 0, 888 atau 999 pada kuesioner puskesmas blok VIII.

Tabel 2. 2 Pertanyaan Jumlah Dokter di Kuesioner Puskesmas Blok VIII

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah (jika = 00, ke baris berikutnya)
(1)	(2)	(3)
1.	b. Dokter Layanan Primer	<input type="text"/> <input type="text"/>
	c. Dokter umum	<input type="text"/> <input type="text"/>

7) Puskesmas dan klinik terakreditasi minimal utama

Puskesmas:

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas terakreditasi dasar (Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. 9b kode 1)}}{\text{Total Puskesmas terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.8 kode 1 – 2)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas terakreditasi madya} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. 9b kode 2)}}{\text{Total Puskesmas terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.8 kode 1 – 2)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas terakreditasi utama} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. 9b kode 3)}}{\text{Total Puskesmas terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.8 kode 1 – 2)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah puskesmas terakreditasi paripurna} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. 9b kode 4)}}{\text{Total Puskesmas terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.8 kode 1 – 2)}} \times 100\%$$

Klinik:

Data diambil dari kuesioner Klinik Blok III

$$= \frac{\text{Jumlah klinik terakreditasi dasar} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. A.09 kode 1)}}{\text{Total klinik terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.A.07 kode 1)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah klinik terakreditasi utama} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor. A.09 kode 2)}}{\text{Total klinik terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.A.07 kode 1)}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Jumlah klinik terakreditasi paripurna} \\ \text{(Menjawab pertanyaan Blok III Nomor A.09 kode 3)}}{\text{Total klinik terakreditasi (menjawab pertanyaan blok III no.A.07 kode 1)}} \times 100\%$$

8) Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar

- a. Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar 2015-2019 yaitu puskesmas memiliki ketersediaan obat dan vaksin minimal 80% (16 item) dari 20 item obat dan vaksin indikator sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Jenis obat dan vaksin indikator 2015-2019

No	Nama Obat/Vaksin	No Pertanyaan di
1	Efinefrin / Adrenalin injeksi	Blok XII 12.8.1 no 2 berkode 1
2	Albendazol tablet	Blok XII 12.8.1 no 4 berkode 1
3	Amoksisilin tablet	Blok XII 12.8.1 no 14 berkode 1
4	Amoksisilin sirup	Blok XII 12.8.1 no 13 berkode 1
5	Deksametason tablet	Blok XII 12.8.1 no 58 berkode 1
6	Diazepam tablet	Blok XII 12.8.1 no 65 berkode 1
7	Furosemid tablet	Blok XII 12.8.1 no 115 berkode 1
8	Garam oralit serbuk	Blok XII 12.8.1 no 117 berkode 1
9	Glibenklamid tablet	Blok XII 12.8.1 no 121 berkode 1
10	Kaptopril tablet	Blok XII 12.8.1 no 165 berkode 1
11	Magnesium Sulfat injeksi	Blok XII 12.8.1 no 211 berkode 1
12	Metilergometrin injeksi	Blok XII 12.8.1 no 217 berkode 1
13	Obat anti tuberculosis	Blok XII 12.8.1 no 243 berkode 1
14	Oksitosin injeksi	Blok XII 12.8.1 no 250 berkode 1
15	Parasetamol tablet	Blok XII 12.8.1 no 257 berkode 1

No	Nama Obat/Vaksin	No Pertanyaan di
16	Tablet tambah darah	Blok XII 12.8.1 no 322 berkode 1
17	Fitomenadion injeksi (vitamin K)	Blok XII 12.8.1 no 361 berkode 1
18	Vaksin BCG	Blok XII 12.9.2 no 1a berkode 1
19	Vaksin TT	Blok XII 12.9.2 no 1b berkode 1
20	Vaksin DPT Hb	Blok XII 12.9.2 no 1k atau
	Vaksin DPT Hb HiB	Blok XII 12.9.2 no 1l

Unit analisis : Puskesmas, kuesioner puskesmas blok XII

Recode : Blok XII 12.9.2 no 1k atau Blok XII 12.9.2 no 1l berkode 1 → diganti menjadi *new variable DPT baru* dengan label1 *through highest* di-recode jadi 1, yang tidak ada keduanya di-recode menjadi 0.

Langkah perhitungan rerata ketersediaan obat dan vaksin:

1) Hitung persentase ketersediaan item obat dan vaksin di setiap puskesmas

- % Ketersediaan obat vaksin di puskesmas 1

$$= \frac{\text{jumlah total item obat dan vaksin berkode}}{20} \times 100\%$$
- % Ketersediaan obat vaksin di puskesmas 2

$$= \frac{\text{jumlah total item obat dan vaksin berkode}}{20} \times 100\%$$

Dan seterusnya.....

2) Hitung rerata persentase ketersediaan obat di setiap kriteria puskesmas

- % Ketersediaan obat dan vaksin provinsi

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas perkotaan 1} + \text{puskesmas perkotaan 2} + \dots .dst}{\text{jumlah puskesmas perkotaan di setiap provinsi}}$$
- % Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas perkotaan

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas perkotaan 1} + \text{puskesmas perkotaan 2} + \dots .dst}{\text{jumlah puskesmas perkotaan di setiap provinsi}}$$
- % Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas perdesaan

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas perdesaan 1} + \text{puskesmas perdesaan 2} + \dots .dst}{\text{jumlah puskesmas perdesaan di setiap provinsi}}$$
- % Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas terpencil/sangat terpencil

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas T/ST 1} + \text{puskesmas T/ST 2} + \dots .dst}{\text{jumlah puskesmas T/ST di setiap provinsi}}$$
- % Ketersediaan obat dan vaksin nasional

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas 1} + \text{puskesmas 2} + \dots .dst}{\text{jumlah puskesmas Total}}$$

b. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (indikator 2020-2024)

1) Definisi operasional : Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80% obat esensial (Pemantauan dilakukan terhadap 40 item obat indikator)

2) Cara Perhitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80\% obat esensial}}{\text{Jumlah Puskesmas yang melapor}} \times 100\%$$

3) Unit analisis : Puskesmas, kuesioner puskesmas blok XII

Tabel 2. 4 Daftar Obat Esensial Indikator 2020-2024 (40 obat)

No	Nama Obat/Vaksin
1	Albendazol tab/Pirantel tablet
2	Allopurinol tablet
3	Amoksisilin 500 mg tablet
4	Amoksisilin syrup
5	Antasida DOEN I tablet kunyah kombinasi/Antasida DOEN II Suspensi kombinasi
6	Asam Askorbat tablet
7	Asiklovir 400 mg tablet/kapsul
8	Betametason salep
9	Siprofloksasin tablet
10	Deksametason tablet/Deksametason injeksi
11	Diazepam injeksi 5 mg/mL
12	Diazepam tablet
13	Dihidroartemisin+piperakuin (DHP)+Primaquin
14	Difenhidramin Injeksi 10 mg/ml
15	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)
16	Fitomenadion (Vitamin K) injeksi
17	Furosemid 40 mg tablet /Hidroklorotiazid (HCT)
18	Garam oralit
19	Glibenklamid/Metformin tablet
20	Hidrokortison krim/salep
21	Ibuprofen tablet/kapsul
22	Kaptopril tablet
23	Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi/Kotrimoksazol Suspensi
24	Lidokain injeksi
25	Magnesium Sulfat injeksi 20%
26	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml
27	Natrium Diklofenak tablet
28	Obat Anti Tuberculosis Dewasa
29	Oksitosin injeksi
30	Parasetamol 500 mg tablet
31	Parasetamol sirup 120 mg/5 ml
32	Prednison 5 mg tablet
33	Ranitidin tablet
34	Salbutamol tablet
35	Salep/Tetes mata antibiotik
36	Simvastatin tablet

No	Nama Obat/Vaksin
37	Tablet Tambah Darah
38	Triheksifenidil tablet
39	Vitamin B6 (Piridoksin) tablet
40	Zinc tablet

Perhitungan ketersediaan obat esensial akan menggunakan data 35 obat yang sesuai dengan kuesioner puskesmas sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Daftar 35 Obat Esensial Indikator 2020-2024 yang Terdapat di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Nama Obat/Vaksin	No Pertanyaan di kuesioner puskesmas
1	Albendazol tab/Pirantel tablet	Blok XII 12.8.1 no 4 atau Blok XII 12.8.1 no 265→ jadikan variabel baru dan berkode 1
2	Allopurinol tablet	Blok XII 12.8.1 no 5 berkode 1
3	Amoksisilin 500 mg tablet	Blok XII 12.8.1 no 14 berkode 1
4	Amoksisilin syrup	Blok XII 12.8.1 no 13 berkode 1
5	Antasida DOEN I tablet kunyah kombinasi/Antasida DOEN II Suspensi kombinasi	Blok XII 12.8.1 no 22 berkode 1
6	Asiklovir 400 mg tablet/kapsul	Blok XII 12.8.1 no 41 berkode 1
7	Betametason salep	Blok XII 12.8.1 no 51 berkode 1
8	Siprofloksasin tablet	Blok XII 12.8.1 no 314 berkode 1
9	Diazepam injeksi 5 mg/mL	Blok XII 12.8.1 no 63 berkode 1
10	Diazepam tablet	Blok XII 12.8.1 no 65 berkode 1
11	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)	Blok XII 12.8.1 no 2 berkode 1
12	Fitomenadion (Vitamin K) injeksi	Blok XII 12.8.1 no 361 berkode 1
13	Furosemid 40 mg tablet /Hidroklorotiazid (HCT)	Blok XII 12.8.1 no 115 atau Blok XII 12.8.1 no 132→ jadikan variable baru dan berkode 1
14	Garam oralit	Blok XII 12.8.1 no 117 berkode 1
15	Glibenklamid/Metformin tablet	Blok XII 12.8.1 no 121 atau Blok XII 12.8.1 no 215 → jadikan variable baru dan berkode 1
16	Ibuprofen tablet/kapsul	Blok XII 12.8.1 no 140 berkode 1
17	Kaptopril tablet	Blok XII 12.8.1 no 165 berkode 1
18	Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi/Kotrimoksazol Suspensi	Blok XII 12.8.1 no 193 atau Blok XII 12.8.1 no 194→ jadikan variable baru dan berkode 1
19	Lidokain injeksi	Blok XII 12.8.1 no 202 berkode 1
20	Magnesium Sulfat injeksi 20%	Blok XII 12.8.1 no 211 berkode 1
21	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml	Blok XII 12.8.1 no 217 berkode 1
22	Natrium Diklofenak tablet	Blok XII 12.8.1 no 233 berkode 1
23	Obat Anti Tuberculosis Dewasa	Blok XII 12.8.1 no 243 berkode 1
24	Oksitosin injeksi	Blok XII 12.8.1 no 250 berkode 1

No	Nama Obat/Vaksin	No Pertanyaan di kuesioner puskesmas
25	Parasetamol 500 mg tablet	Blok XII 12.8.1 no 257 berkode 1
26	Parasetamol sirup 120 mg/5 ml	Blok XII 12.8.1 no 256 berkode 1
27	Prednison 5 mg tablet	Blok XII 12.8.1 no 274 berkode 1
28	Ranitidin tablet	Blok XII 12.8.1 no 284 berkode 1
29	Salbutamol tablet	Blok XII 12.8.1 no 297 berkode 1
30	Salep/Tetes mata antibiotic	Kloramfenikol salep mata Blok XII 12.8.1 no 183 atau Kloramfenikol tetes mata Blok XII 12.8.1 no 184 → jadikan variable baru dan berkode 1
31	Simvastatin tablet	Blok XII 12.8.1 no 312 berkode 1
32	Tablet Tambah Darah	Blok XII 12.8.1 no 322 berkode 1
33	Triheksifenidil tablet	Blok XII 12.8.1 no 348 berkode 1
34	Vitamin B6 (Piridoksin) tablet	Blok XII 12.8.1 no 359 berkode 1
35	Zinc tablet	Blok XII 12.8.1 no 367 berkode 1

Langkah perhitungan :

- hitung persentase ketersediaan item obat dan vaksin di setiap puskesmas

- % ketersediaan obat vaksin di puskesmas 1

$$= \frac{\text{jumlah total item obat dan vaksin berkode 1}}{35} \times 100\%$$

- % ketersediaan obat vaksin di puskesmas 2

$$= \frac{\text{jumlah total item obat dan vaksin berkode 1}}{35} \times 100\%$$

Dan seterusnya..

- Hitung rerata persentase ketersediaan obat di setiap kriteria puskesmas

- % ketersediaan obat vaksin provinsi

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas 1} + \text{puskesmas 2} + \dots . \text{dst}}{\text{jumlah puskesmas di setiap provinsi}}$$

- % ketersediaan obat vaksin di puskesmas perkotaan

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas perkotaan 1} + \text{puskesmas perkotaan 2} + \dots . \text{dst}}{\text{jumlah puskesmas perkotaan di setiap provinsi}}$$

- % ketersediaan obat vaksin di puskesmas perdesaan

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas perdesaan 1} + \text{puskesmas perdesaan 2} + \dots . \text{dst}}{\text{jumlah puskesmas perdesaan di setiap provinsi}}$$

- % ketersediaan obat vaksin di puskesmas $\frac{\text{Terpencil}}{\text{sangat}} \text{ terpencil}$

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas } T/ST \ 1 + \text{ puskesmas } T/ST \ 2 + \dots . \text{ dst}}{\text{jumlah puskesmas } T/ST \ \text{di setiap provinsi}}$$

- % ketersediaan obat vaksin nasional

$$= \frac{\% \text{ ketersediaan di puskesmas } 1 + \text{ puskesmas } 2 + \dots . \text{ dst}}{\text{jumlah puskesmas total}}$$

9) Klinik dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Kuesioner Klinik Blok V (1.1a dan 1.1b kolom 2).

Tabel 2. 6 Standar ketenagaan di klinik pratama menurut Permenkes No. 9 tahun 2014

No	Jenis Tenaga	Klinik Pratama
1	Tenaga medis (dokter dan atau dokter gigi)	2

Kuesioner Klinik Blok V (1.1c kolom 2)

Tabel 2. 7 Standar ketenagaan di klinik utama menurut Permenkes No.9 tahun 2014

No	Jenis Tenaga	Klinik Utama
1	Dokter spesialis	1
2	Dokter	1

Kuesioner klinik Blok V (1.1d kolom 2)

Tabel 2. 8 Standar ketenagaan di klinik utama (pelayanan gigi) menurut Permenkes No.9 tahun 2014

No	Jenis Tenaga	Klinik Utama
1	Dokter gigi spesialis	1
2	Dokter gigi	1

2.2. Indikator Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024

1) Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja

Indikator : Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja.

Definisi operasional : Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja adalah:

1. Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja minimal level 1.
2. Ada SK/SE yang mendukung pelaksanaan kesehatan kerja Tk Kab/Kota
3. Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal (pendataan dan pembinaan)
4. Pembinaan K3 Fasyankes Tk Kab/Kota (pendataan dan pembinaan)
5. Tersedianya jabatan fungsional Tk Kab/Kota

Tabel 2. 9 Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Penyusun indikator	Data yang dikumpulkan Rifaskes 2019	No.pertanyaan
1.	Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan kerja minimal level 1.	Komposit indikator kesehatan kerja puskesmas \geq 60%	Dari data puskesmas
2	Ada SK/SE yang mendukung pelaksanaan kesehatan kerja Tk Kab/Kota	Terdapat SK/SE Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan program kesehatan kerja di tingkat Kab/Kota	Data kuesioner dinas No. IV.4.1.3.16=1
3	Pembinaan kesehatan kerja di sektor formal (pendataan dan pembinaan)	Terdapat advokasi dn koordinasi pelaksanaan gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) di perusahaan Terdapat advokasi dn koordinasi pelaksanaan K3 di perkantoran	Data kuesioner dinas No. IV.4.1.3.17=1 Data kuesioner dinas No. IV.4.1.3.18
4	Pembinaan K3 Fasyankes Tk Kab/Kota (pendataan dan pembinaan)	Dilakukan pembinaan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan	Data kuesioner dinas No. IV.4.1.3.19=1
5	Tersedianya jabatan fungsional Tk Kab/Kota	Jumlah tenaga jabatan fungsional pembina keselamatan dan kesehatan kerja di kabupaten/kota	Data kuesioner dinas No. IV.4.1.3.20 \geq 1

Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja minimal yaitu Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja (minimal 1 kegiatan internal

dan 1 kegiatan eksternal) dibagi Persentase Puskesmas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun, di kali 100%.

Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja internal

Tabel 2. 10 Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kesehatan Kerja Internal di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Penyusun indikator	Data Rifaskes 2019	No.pertanyaan
1.	Perencanaan kegiatan kesehatan kerja	Laporan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	No. VII.7.e=1
2.	Pelaksanaan K3 fasyankes (SOP, jalur evakuasi, penggunaan APD, APAR, peta identifikasi bahaya dan faktor risiko)	standar prosedur operasi (SOP/SPO) cuci tangan Tersedia alat pelindung diri (APD) Tersedia jalur evakuasi Terdapat alat pemadam api ringan (APAR) terdapat peta identifikasi bahaya terdapat identifikasi faktor risiko	No. VII.7.f=1 No. VII.7.h=1 No. VII.7.l=1 No. VII.7.m=1 No VII.7.o=1 No VII.7.p=1
3	Pelayanan PAK (deteksi dini risiko penyakit (PM & PTM) dan penatalaksanaan PAK)	terdapat pelayanan PAK antara lain deteksi dini dan penatalaksanaan PAK Terdapat pencatatan jenis pekerjaan pekerja Terdapat deteksi dini risiko penyakit pada kelompok pekerja	No VII.7.n=1 No VII.7.v=1 No VII.7.u=1
4.	Ada tenaga Jabfung	Ada pejabat fungsional pembimbing Kesehatan kerja di pkm	No VII.7.d=1

Pelaksanaan kesehatan kerja eksternal yang didata adalah

Tabel 2. 11 Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kesehatan Kerja Eksternal di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Penyusun indikator	Data Rifaskes 2019	No.pertanyaan
1	Pemberdayaan dan pembinaan pekerja informal (target minimal 1 pos UKK per Puskesmas)	jumlah Pos UKK Terdapat kegiatan pembinaan Pos UKK	No VII.7.a=1 No VII.7.w=1
2	Pembinaan Kesehatan Kerja di	Terdapat penyuluhan kesehatan pada	No VII.7.f=1

	perusahaan (dibuktikan dengan adanya; laporan kegiatan pembinaan)	kelompok pekerja	
		Pembinaan gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif ada laporan pembinaan	No VII.7.x=1
		Pembinaan K3 fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayahnya	No VII.7.y=1
3	Identifikasi faktor risiko kesehatan di tempat kerja pada wilayah kerjanya	identifikasi faktor risiko di tempat kerja di wilayah kerja puskesmas	No VII.7.s=1

Rumus:

$$[\{ (VII.7.e=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.f=1) \& (VII.7.h=1) \& (VII.7.l=1) \& (VII.7.m=1) \& (VII.7.o=1) \& (VII.7.p=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.n=1) \& (VII.7.v=1) \& (VII.7.u=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.d=1) \} \& [\{ (VII.7.a \geq 1) \& (VII.7.w=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.t=1) \& (VII.7.x=1) \& (VII.7.y=1) \} \text{ or } (VII.7.s=1)] \geq 60\%$$

Rumus untuk menghitung Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja:

Kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja =

$$[\{ (VII.7.e=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.f=1) \& (VII.7.h=1) \& (VII.7.l=1) \& (VII.7.m=1) \& (VII.7.o=1) \& (VII.7.p=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.n=1) \& (VII.7.v=1) \& (VII.7.u=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.d=1) \} \& [\{ (VII.7.a \geq 1) \& (VII.7.w=1) \} \text{ or } \{ (VII.7.t=1) \& (VII.7.x=1) \& (VII.7.y=1) \} \text{ or } (VII.7.s=1)] \geq 60\% \& [(IV.4.1.3.16=1)] \& [(IV.4.1.3.17=1) \text{ or } (IV.4.1.3.18=1)] \& [(IV.4.1.3.19=1)] \& [(IV.4.1.3.20 \geq 1)]$$

Jumlah Dinas kabupaten kota

2) Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olah raga.

Indikator: Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan olah raga

Definisi operasional: Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olah raga adalah:

1. Minimal 60% Puskesmas melaksanakan kesehatan olah raga level 1.
2. Ada SK/SE tentang olah raga/aktivitas fisik di Kab/Kota
3. Pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota

Tabel 2. 12 Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Penyusun indikator	Data Rifaskes 2019	No.pertanyaan
1.	Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan olah raga level 1.	Komposit indikator kesehatan olah raga puskesmas $\geq 60\%$	Dari data puskesmas (komposit)
2	Ada SK/SE tentang olah raga/aktivitas fisik Tk Kab/Kota	Terdapat SK/SE Bupati/Walikota/Kepala Dinas Kesehatan atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan program kesehatan olah raga di tingkat Kab/Kota	Data kuesioner dinas No. IV.4.1.4.21=1
3	Pembinaan kebugaran jasmani pekerja di tingkat kabupaten kota	Terdapat kegiatan pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten kota	Data kuesioner dinas No. IV.4.1.4.22=1

Rumus

Minimal 60% Puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan kesehatan olah raga level 1, yaitu :

1. Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga adalah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga yang dilaksanakan di dalam gedung Puskesmas dan melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga di luar gedung puskesmas.

Upaya kesehatan olah raga di dalam gedung puskesmas sebagai berikut:

- a. Ada Perencanaan kegiatan kesehatan olah raga
 - b. Ada peregangan
 - c. Ada senam bersama setiap 1 minggu sekali
 - d. Pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai
2. Upaya kesehatan olah raga di luar gedung puskesmas, sebagai berikut :
 - a. Pembinaan kelompok olahraga pada masyarakat termasuk kelompok masyarakat khusus misal diabetesi, hipertensi (data kelompok olahraga dan hasil pemeriksaan kebugaran) ; Kelas ibu hamil ; UKS ; Lansia
 - b. Pengembangan model intervensi peningkatan aktivitas fisik pada UKBM (posbindu PTM, posyandu lansia), dibuktikan dengan laporan kegiatan

3. Cara perhitungan

Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga adalah:
 Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga

minimal level 1 kegiatan internal dan eksternal dibagi Jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun, di kali 100%.

4. Dalam Rifaskes 2019, dikumpulkan data terkait pelaksanaan kesehatan olah raga di dalam gedung puskesmas dan di luar gedung puskesmas.

Pelaksanaan kesehatan olah raga di dalam gedung puskesmas yang didata adalah :

Tabel 2. 13 Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Pelaksanaan Kesehatan Olah Raga Dalam Gedung Puskesmas di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Penyusun indikator	Data Rifaskes 2019	No.pertanyaan
1.	Ada peregangan	Peregangan (ada jadwal, laporan/dokumentasi)	Blok VII.8.a=1
2.	Ada senam bersama setiap 1 minggu sekali	Melaksanakan senam bersama setiap 1 minggu sekali	Blok VII.8.b=1
3.	Pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai	Pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai Puskesmas	Blok VII.8.c=1

Pelaksanaan kesehatan olahraga di luar gedung puskesmas yang didata adalah:

Tabel 2. 14 Daftar Pertanyaan Penyusun Indikator Pelaksanaan Kesehatan Olah Raga Luar Gedung Puskesmas di Kuesioner Rifaskes 2019

No	Penyusun indikator	Data Rifaskes 2019	No.pertanyaan
1.	Pembinaan kelompok olahraga pada masyarakat termasuk kelompok masyarakat khusus misal diabetesi, hipertensi (data kelompok olahraga dan hasil pemeriksaan kebugaran) ; Kelas ibu hamil ; UKS ; Lansia	Pembinaan kelompok olah raga da masyarakat termasuk kelompok masyarakat khusus misal diabetes, hipertensi, kelas ibu hamil, UKS, lansia Pembinaan event olah raga	Blok VII.8.d=1 Blok VII.8.f=1
2.	Pengembangan model intervensi peningkatan aktivitas fisik pada UKBM (posbindu PTM ,posyandu lansia), dibuktikan dengan laporan kegiatan	Pengembangan model intervensi peningkatan aktivitas fisik pada UKBM (posbindu PTM ,posyandu lansia), yang dibuktikan dengan laporan kegiatan	Blok VII.8.e=1

Rumus Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga =

$$[\{ (\text{VII.8.a}=1) \text{ or } (\text{VII.8.b}=1) \text{ or } (\text{VII.8.c}=1) \} \} \& \{ \{ (\text{VII.8.d}=1) \text{ or } (\text{VII.8.e}=1) \text{ or } (\text{VII.8.f}=1) \} \}] \geq 60\%$$

Jumlah puskesmas

Rumus Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan olah raga =

$$[\{ (\text{VII.8.a}=1) \text{ or } (\text{VII.8.b}=1) \text{ or } (\text{VII.8.c}=1) \} \} \& \{ \{ (\text{VII.8.d}=1) \text{ or } (\text{VII.8.e}=1) \text{ or } (\text{VII.8.f}=1) \} \}] \geq 60\% \& [(\text{IV.4.1.4.21}=1)] \& [(\text{IV.4.1.4.22}=1)]$$

Jumlah kabupaten kota

3) Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Audit maternal perinatal/ AMP

Kuesioner Dinkes Blok IV no. 14

4.1.2. Kesehatan Keluarga			
14	Melaksanakan Audit Maternal dan Perinatal tahun 2018	1. Ya	2. Tidak → Ke. P.16 <input type="checkbox"/>

Rumus:

$$\text{Persentase kabupaten kota yang melaksanakan audit maternal perinatal (AMP)} = \frac{\sum \text{Kabupaten Kota yang melaksanakan AMP}}{\sum \text{Kabupaten kota}} \times 100$$

4) Cakupan Puskesmas Melaksanakan pelayanan reproduksi bagi calon pengantin

Definisi operasional : Puskesmas Melaksanakan pelayanan reproduksi bagi calon pengantin adalah puskesmas yang melaksanakan 1) melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon pengantin, 2) memberikan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin, dan 3) memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin

Kuesioner Puskesmas Blok VII no 11 : a,b,c

11.	Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin		
	a. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon pengantin	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	b. Memberikan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
	c. Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

Rumus:

Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi Calon Pengantin

$$= \frac{\sum \text{Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kespro bagi calon pengantin (Blok VII no 11 : a, b, c berkode 1)}}{\sum \text{Puskesmas}} \times 100$$

Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid pada Calon Pengantin

$$= \frac{\sum \text{Puskesmas yang memberikan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid pada calon pengantin (Blok VII no 11 b berkode 1)}}{\sum \text{Total Puskesmas}} \times 100$$

5) Cakupan PKM melaksanakan MTBS

Kuesioner Puskesmas Blok III no 47 dengan kode 1 “Ya”

47	Apakah puskesmas menjalankan program MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
----	---	----------------	--------------------------

Rumus :

Persentase puskesmas yang melaksanakan MTBS

$$= \frac{\sum \text{Puskesmas yang melaksanakan MTBS (Blok III no 47 dengan kode 1)}}{\sum \text{Total Puskesmas}} \times 100$$

6) Persentase Kab/kota yang mengeluarkan Kebijakan yang mendukung Perilaku Sehat

Definisi Operasional: kabupaten/kota yang punya kebijakan mendukung perilaku sehat dibagi total kabupaten/kota.

Kuesioner Dinkes/Blok IV no 23

4.1.5. Promosi Kesehatan		
23	Terdapat kebijakan tingkat kabupaten/kota yang mendukung kearah gerakan Perilaku Hidup Sehat yang implementasinya melibatkan lintas sektor/mitra potensial/masyarakat (observasi dokumen)	1. Ya 2. Tidak <input type="checkbox"/>

7) Persentase kab/kota yang memiliki tatanan sehat /ber PHBS

Definisi Operasional: kabupaten/kota yang memiliki tatanan sehat (rumah tangga/keluarga, pesantren, sekolah, rumah sakit, pabrik, tempat wisata) yang menyelenggarakan promosi kesehatan untuk meningkatkan PHBS masyarakat dibagi total kabupaten/kota.

Kuesioner Dinkes Blok IV no 24

24	Terdapat penetapan tatanan sehat (rumah tangga/keluarga, pesantren, sekolah, rumah sakit, pabrik, tempat wisata) yang menyelenggarakan promosi kesehatan untuk meningkatkan PHBS masyarakat.	1. Ya 2.Tidak <input type="checkbox"/>
----	--	--

8) Persentase Kab./Kota yang melaksanakan kampanye perilaku sehat

Definisi Operasional: kabupaten/kota yang melaksanakan kampanye perilaku hidup sehat tahun 2018 melalui media elektronik, non elektronik, dan media sosial dibagi total kabupaten/kota.

Kuesioner Dinkes Blok IV no. 25

25	Melakukan kampanye peningkatan perilaku hidup sehat tahun 2018 melalui media elektronik, non elektronik, dan media social (observasi dokumen)	1. Ya 2.Tidak <input type="checkbox"/>
----	---	--

9) Persentase desa/kelurahan siaga aktif

Definisi Operasional: jumlah desa/kelurahan siaga aktif dibagi jumlah desa/kelurahan total di kab/kota

Kuesioner Dinkes Blok IV no. 28

28	Jumlah desa dan kelurahan siaga aktif	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----	---------------------------------------	--

10) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan

Definisi Operasional: jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan promosi kesehatan dibagi jumlah puskesmas

Kuesioner Puskesmas Blok VII No. 5a: Puskesmas melakukan upaya kesehatan masyarakat esensial, pelayanan promosi kesehatan.

Blok VII. 10 a: apakah terdapat tenaga yang ditugaskan khusus sebagai penanggung jawab program promkes

11) Kabupaten/kota menyelenggarakan surveilans gizi

Definisi Operasional: Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan surveilans gizi

Kuesioner Dinkes Blok IV No. 30 Kode 1

4.1.6. Gizi			
30	Menyelenggarakan surveillans gizi	1. Ya 2.Tidak	<input type="checkbox"/>

12) Persentase puskesmas melaksanakan Proses Asuhan Gizi (PAG)

Definisi Operasional: jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan gizi dibagi jumlah puskesmas

13) Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penularan Hepatitis B dari ibu ke anak

Kuesioner Dinkes: Pertanyaan no 41: saringan melakukan kegiatan pencegahan pengendalian → kode 1 Ya

Pertanyaan Blok IV, subblok 4.2.4. Nomor 42a (kuesioner dinkes kabupaten/kota)

42	Kelompok sasaran yang dilakukan pemeriksaan HBsAg pada tahun 2018 (KODE "1" JIKA "YA", KODE "2" JIKA "TIDAK")			
	a. Anak yang lahir dari ibu penderita hepatitis B	<input type="checkbox"/>	f. Kontak serumah dengan penderita	<input type="checkbox"/>

Rumus :

Persentase puskesmas yang melaksanakan MTBS

$$= \frac{\text{Pertanyaan blok IV, subblok 4.2.4 No 42a (Kuesioner Dinkes kabupaten / kota)}}{\sum \text{Kabupaten/Kota}} \times 100$$

14) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 80% desa berposbindu

Kuesioner puskesmas blok III no 8c

18.	a. Jumlah Posyandu Lansia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Jumlah pos pembinaan terpadu (posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Jumlah desa/kelurahan di wilayah kerja puskesmas yang memiliki posbindu PTM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19		<input type="text"/>	<input type="text"/>

11	a. Jumlah desa di wilayah kerja	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Jumlah kelurahan di wilayah kerja	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Luas wilayah kerja puskesmas (km ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jumlah semua desa/kelurahan yang memiliki posbindu dalam satu kabupaten/kota
(Kuesioner puskesmas Blok III nomor 18c)

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah semua desa/kelurahan yang memiliki posbindu dalam satu kabupaten/kota (Kuesioner puskesmas Blok III nomor 18c)}}{\text{Jumlah semua desa/kelurahan dalam satu kabupaten/kota (Kuesioner puskesmas Blok III nomor 11 a + 11b)}} \geq 80\%$$

Cara penghitungan:

- Jumlah desa/kelurahan dalam 1 kab/kota (A)
- Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu dalam 1 kab/kota (B)
- Persentase B/Ax100%
- Jumlah kab/kota yang memiliki desa berposbindu $\geq 80\%$ dibandingkan dengan jumlah kabupaten/kota

15) Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan Sadanis dan IVA Kuesioner Puskesmas Blok VII No 2o

Jumlah semua puskesmas yang melakukan pemeriksaan IVA
(Kuesioner puskesmas Blok VII nomor 2o)

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah puskesmas yang melakukan pemeriksaan IVA}}{\text{Jumlah semua puskesmas}}$$

16) Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan kekarantinaan kesehatan

Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan peraturan mengenai kekarantinaan kesehatan (Kuesioner dinas kesehatan Blok IV nomor 45)

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan peraturan mengenai kekarantinaan kesehatan}}{\text{Jumlah kabupaten/kota}}$$

Kuesioner Dinkes Blok IV No. 45

45	Apakah pemerintah daerah/dinas kesehatan telah menerbitkan regulasi (kebijakan) tentang kekarantinaan kesehatan? (CEK DOKUMEN)	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
----	--	----------------	--------------------------

17) Persentase kabupaten/kota yang 10 % puskesmasnya melaksanakan upaya P2 Keswa dan Napza

Definisi operasional: Kabupaten/kota yang 10% puskesmas melaksanakan upaya P2 Keswa dan Napza

Rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah kab kota melaksanakan upaya Keswa dan Napza}}{\text{Total kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Kuesioner Puskesmas Blok VII no.12

12.	Pelayanan Kesehatan Jiwa, Narkotika, dan Zat Adktif		
a.	Memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kesehatan jiwa	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
b.	Memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Narkotika dan Zat Adiktif	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
c.	Memberikan pelayanan pengobatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
d.	Puskesmas melakukan pendataan dan analisa ODMK dan ODGJ di wilayah kerja?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
e.	Puskesmas melakukan pendataan dan analisa pengguna narkotika dan zat adiktif di wilayah kerja	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>
f.	Memberikan pelayanan pengobatan kecanduan narkotika dan zat adiktif	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>

Cara penghitungan:

Perhitungan per puskesmas

Kuesioner Puskesmas Blok VII no. 12: a-f masing-masing diberi kode 1

Perhitungan a-f komposit (and) A

Perhitungan a-f (OR)- A'

Perhitungan lain: a and c and d atau b and e and f (LAIN)

Perhitungan indikator tipe 1 (AND)

C = Jumlah puskesmas melakukan pelayanan jiwa dan napza (A) / jumlah puskesmas dalam 1 kab/kota (B)

Jumlah kab/kota dengan puskesmas minimal 10% atau 20% melakukan pelayanan/jumlah total kab/kota = C/total kab/kota*100%

Perhitungan indikator tipe 2 (OR)

C' = Jumlah puskesmas melakukan pelayanan jiwa dan napza (A') / jumlah puskesmas dalam 1 kab/kota (B)

Jumlah kab/kota dengan puskesmas minimal 10% atau 20% melakukan pelayanan/jumlah total kab/kota => $C'/\text{total kab/kota} \times 100\%$

Perhitungan indikator tipe 3 (LAIN)

C'' = Jumlah puskesmas melakukan pelayanan jiwa dan napza (A'')/jumlah puskesmas dalam 1 kab/kota (B)

Jumlah kab/kota dengan puskesmas minimal 10% atau 20% melakukan pelayanan/jumlah total kab/kota => $C''/\text{total kab/kota} \times 100\%$

BAB III
HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR UTAMA

3.1 Indikator RPJMN 2020-2024

Tabel 3.1. 1 Proporsi Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan atau RS dalam Pelayanan Darah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Puskesmas rawat jalan		Rawat inap	
		n	%	n	%
Aceh	347	27	14,7	31	19,0
Sumatera Utara	571	40	9,8	17	10,5
Sumatera Barat	271	32	21,2	18	15,0
Riau	216	15	13,8	19	17,8
Jambi	193	7	6,4	15	17,9
Sumatera Selatan	328	17	7,9	15	13,3
Bengkulu	179	17	12,8	7	15,2
Lampung	299	28	17,8	20	14,1
Kep. Bangka Belitung	63	9	25,7	10	35,7
Kep. Riau	80	8	21,6	9	20,9
Dki Jakarta	313	11	3,6	1	20,0
Jawa Barat	1.069	133	16,8	53	19,3
Jawa Tengah	876	97	18,9	81	22,3
Di Yogyakarta	120	4	5,6	11	22,4
Jawa Timur	964	59	17,4	153	24,5
Banten	233	26	17,4	23	27,4
Bali	120	26	33,3	15	35,7
Nusa Tenggara Barat	161	6	22,2	25	18,7
Nusa Tenggara Timur	374	24	13,2	20	10,4
Kalimantan Barat	241	31	25,8	26	21,5
Kalimantan Tengah	197	13	11,7	9	10,5
Kalimantan Selatan	232	20	11,4	8	14,3
Kalimantan Timur	178	5	5,9	10	10,8
Kalimantan Utara	55	2	5,9	0	0,0
Sulawesi Utara	193	6	6,1	10	10,6
Sulawesi Tengah	196	12	12,5	22	22,0
Sulawesi Selatan	452	18	12,0	74	24,5
Sulawesi Tenggara	281	7	3,8	5	5,2
Gorontalo	93	31	48,4	15	51,7
Sulawesi Barat	94	3	9,7	17	27,0
Maluku	199	4	2,9	5	7,9
Maluku Utara	129	9	10,8	2	4,3
Papua Barat	157	11	9,3	4	10,3
Papua	356	25	10,1	9	8,3
INDONESIA	9.830	783	13,7	759	18,5

Tabel 3.1. 2 Proporsi Puskesmas Mampu PONED berdasarkan Karakteristik Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Mampu PONED %	Puskesmas Perkotaan		Puskesmas Perdesaan		Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil	
			n	%	n	%	n	%
Aceh	347	22,8	16	24,6	42	24,3	18	20,2
Sumatera Utara	571	27,3	35	25,7	86	33,2	21	23,6
Sumatera Barat	271	32,5	16	30,8	41	30,6	19	38,8
Riau	216	34,7	17	29,8	36	37,9	18	46,2
Jambi	193	37,8	17	37,0	34	36,6	17	39,5
Sumatera Selatan	328	24,1	16	16,2	47	28,8	9	31,0
Bengkulu	179	19,6	4	15,4	19	25,3	2	5,9
Lampung	299	32,4	14	26,9	58	38,2	16	39,0
Kep. Bangka Belitung	63	31,7	4	18,2	12	36,4	2	50,0
Kep. Riau	80	30,0	8	21,6	4	25,0	12	46,2
DKI Jakarta	313	13,7	16	17,4	0	0,0	NA	NA
Jawa Barat	1.069	43,8	135	31,8	249	53,8	32	71,1
Jawa Tengah	876	34,9	85	32,2	207	36,4	2	40,0
DI Yogyakarta	121	30,6	12	35,3	24	35,3	NA	NA
Jawa Timur	964	31,2	54	21,7	193	34,2	6	60,0
Banten	233	59,7	67	57,8	62	64,6	NA	NA
Bali	120	33,3	7	25,9	30	36,6	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	161	36,0	10	40,0	36	39,1	8	23,5
Nusa Tenggara Timur	374	37,7	13	38,2	16	38,1	105	38,2
Kalimantan Barat	241	19,1	7	14,0	12	21,1	21	19,3
Kalimantan Tengah	197	26,9	7	15,2	25	33,8	16	22,5
Kalimantan Selatan	232	22,0	12	20,3	30	24,8	5	11,6
Kalimantan Timur	178	36,0	10	18,5	25	46,3	18	46,2
Kalimantan Utara	55	20,0	4	25,0	4	23,5	3	15,0
Sulawesi Utara	193	25,9	14	28,6	20	25,3	8	26,7
Sulawesi Tengah	196	33,2	6	23,1	17	28,8	34	40,0
Sulawesi Selatan	452	22,8	32	30,5	47	22,3	12	12,8
Sulawesi Tenggara	281	21,7	11	28,9	27	29,0	21	16,7
Gorontalo	93	23,7	8	34,8	13	28,3	1	4,3
Sulawesi Barat	94	35,1	11	68,8	10	27,8	9	25,7
Maluku	199	20,1	5	21,7	13	32,5	18	17,0
Maluku Utara	129	26,4	5	33,3	7	24,1	15	23,4
Papua Barat	157	9,6	2	7,1	3	25,0	10	11,0
Papua	356	21,6	11	26,2	16	31,4	38	19,2
INDONESIA	9.831	30,4	691	28,2	1.465	35,3	516	26,5

Tabel 3.1. 3 Proporsi Posyandu Aktif menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Jumlah posyandu	Posyandu yang aktif	
			n	%
Aceh	347	7.707	7.288	94,6
Sumatera Utara	571	15.077	14.354	95,2
Sumatera Barat	271	7.636	7.580	99,3
Riau	216	5.281	5.196	98,4
Jambi	193	3.342	3.287	98,4
Sumatera Selatan	328	6.579	6.352	96,5
Bengkulu	179	2.256	2.111	93,6
Lampung	299	8.508	8.465	99,5
Kep. Bangka Belitung	63	1.105	1.071	96,9
Kep. Riau	80	1.428	1.390	97,3
Dki Jakarta	313	7.816	7.172	91,8
Jawa Barat	1.069	51.006	49.001	96,1
Jawa Tengah	876	50.464	47.442	94,0
Di Yogyakarta	121	5.838	5.696	97,6
Jawa Timur	964	46.939	45.954	97,9
Banten	233	10.346	10.126	97,9
Bali	120	4.774	4.774	100,0
Nusa Tenggara Barat	161	7.055	6.936	98,3
Nusa Tenggara Timur	373	10.227	9.631	94,2
Kalimantan Barat	241	5.430	5.264	96,9
Kalimantan Tengah	197	2.735	2.575	94,1
Kalimantan Selatan	232	4.104	3.946	96,2
Kalimantan Timur	178	4.532	4.270	94,2
Kalimantan Utara	55	903	739	81,8
Sulawesi Utara	193	2.348	2.285	97,3
Sulawesi Tengah	196	3.272	3.189	97,5
Sulawesi Selatan	452	10.121	9.745	96,3
Sulawesi Tenggara	281	3.218	3.161	98,2
Gorontalo	93	1.314	1.283	97,6
Sulawesi Barat	94	2.143	2.092	97,6
Maluku	199	2.321	2.192	94,4
Maluku Utara	129	1.571	1.495	95,2
Papua Barat	157	1.446	1.396	96,5
Papua	355	3.308	2.704	81,7
INDONESIA	9.829	302.150	290.162	96,0

Tabel 3.1. 4 Proporsi Kabupaten/kota yang Mencapai 80%Imunisasi Dasar Lengkap menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL)			
		<80%		≥80%	
		n	%	n	%
Aceh	23	17	73,9	6	26,1
Sumatera Utara	33	9	29,0	22	71,0
Sumatera Barat	19	9	47,4	10	52,6
Riau	12	6	54,5	5	45,5
Jambi	11	0	0,0	11	100,0
Sumatera Selatan	17	1	6,3	15	93,8
Bengkulu	10	2	20,0	8	80,0
Lampung	15	1	6,7	14	93,3
Bangka Belitung	7	0	0,0	7	100,0
Kepulauan Riau	7	0	0,0	7	100,0
DKI Jakarta	6	0	0,0	6	100,0
Jawa Barat	27	2	7,4	25	92,6
Jawa Tengah	35	0	0,0	35	100,0
DI Yogyakarta	5	0	0,0	5	100,0
Jawa Timur	38	2	5,4	35	94,6
Banten	8	0	0,0	8	100,0
Bali	9	0	0,0	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	12	54,5	10	45,5
Kalimantan Barat	14	5	35,7	9	64,3
Kalimantan Tengah	14	3	21,4	11	78,6
Kalimantan Selatan	13	2	15,4	11	84,6
Kalimantan Timur	10	1	10,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	6	40,0	9	60,0
Sulawesi Tengah	13	3	23,1	10	76,9
Sulawesi Selatan	24	0	0,0	24	100,0
Sulawesi Tenggara	17	1	5,9	16	94,1
Gorontalo	6	2	33,3	4	66,7
Sulawesi Barat	6	3	50,0	3	50,0
Maluku	11	3	33,3	6	66,7
Maluku Utara	10	2	20,0	8	80,0
Papua Barat	13	6	60,0	4	40,0
Papua	29	15	57,7	11	42,3
INDONESIA	514	114	22,8	387	77,2

Tabel 3.1. 5 Proporsi Kesesuaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Perkotaan berdasarkan Karakteristik Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Puskesmas memiliki SK perkotaan n	Rawat inap		Non rawat inap	
			Jumlah	Sesuai standar (%)	Jumlah	Sesuai standar (%)
Aceh	347	65	22	0,0	43	0,0
Sumatera Utara	571	136	35	0,0	101	4,0
Sumatera Barat	271	52	16	0,0	36	8,3
Riau	216	57	23	8,7	34	5,9
Jambi	193	46	16	6,3	30	3,3
Sumatera Selatan	328	99	21	9,5	78	17,9
Bengkulu	179	26	3	0,0	23	0,0
Lampung	299	52	19	5,3	33	0,0
Bangka Belitung	63	22	4	0,0	18	11,1
Kepulauan Riau	80	37	20	0,0	17	0,0
DKI Jakarta	313	92	5	0,0	87	1,1
Jawa Barat	1.069	424	76	5,3	348	3,4
Jawa Tengah	876	264	92	5,4	172	2,3
DI Yogyakarta	121	34	13	38,5	21	28,6
Jawa Timur	964	249	115	0,9	134	3,0
Banten	233	116	46	2,2	70	0,0
Bali	120	27	6	0,0	21	0,0
Nusa Tenggara Barat	161	25	13	23,1	12	16,7
Nusa Tenggara Timur	374	34	9	11,1	25	8,0
Kalimantan Barat	241	50	11	9,1	39	10,3
Kalimantan Tengah	197	46	7	0,0	39	5,1
Kalimantan Selatan	232	59	6	33,3	53	11,3
Kalimantan Timur	178	54	12	0,0	42	7,1
Kalimantan Utara	55	16	4	0,0	12	16,7
Sulawesi Utara	193	49	23	0,0	26	0,0
Sulawesi Tengah	196	26	8	0,0	18	5,6
Sulawesi Selatan	452	105	54	14,8	51	5,9
Sulawesi Tenggara	281	38	12	0,0	26	0,0
Gorontalo	93	23	9	22,2	14	21,4
Sulawesi Barat	94	16	12	16,7	4	0,0
Maluku	199	23	4	0,0	19	0,0
Maluku Utara	129	15	5	0,0	10	20,0
Papua Barat	157	28	4	0,0	24	8,3
Papua	356	42	9	11,1	33	3,0
INDONESIA	9.831	2.447	734	5,7	1.713	5,0

Catatan: Kesesuaian standar berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014

Tabel 3.1. 6 Proporsi Kesesuaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Perdesaan berdasarkan Karakteristik Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Puskesmas memiliki SK perdesaan n	Rawat Inap		Non rawat inap	
			Jumlah	Sesuai standar (%)	Jumlah	Sesuai standar (%)
Aceh	347	173	84	2,4	89	7,9
Sumatera Utara	571	259	84	0,0	175	1,1
Sumatera Barat	271	134	57	1,8	77	2,6
Riau	216	95	51	0,0	44	4,5
Jambi	193	93	46	0,0	47	6,4
Sumatera Selatan	328	163	64	0,0	99	1,0
Bengkulu	179	75	26	0,0	49	0,0
Lampung	299	152	82	2,4	70	0,0
Bangka Belitung	63	33	17	11,8	16	6,3
Kepulauan Riau	80	16	3	0,0	13	7,7
DKI Jakarta	313	2	0	0,0	2	0,0
Jawa Barat	1.069	463	144	1,4	319	2,8
Jawa Tengah	876	569	256	6,3	313	11,2
DI Yogyakarta	121	68	33	24,2	35	45,7
Jawa Timur	964	564	412	1,2	152	3,9
Banten	233	96	37	0,0	59	0,0
Bali	120	82	32	0,0	50	4,0
Nusa Tenggara Barat	161	92	80	8,8	12	8,3
Nusa Tenggara Timur	374	42	19	0,0	23	17,4
Kalimantan Barat	241	57	22	13,6	35	8,6
Kalimantan Tengah	197	74	34	0,0	40	17,5
Kalimantan Selatan	232	121	31	3,2	90	10,0
Kalimantan Timur	178	54	38	2,6	16	0,0
Kalimantan Utara	55	17	5	0,0	12	0,0
Sulawesi Utara	193	79	36	0,0	43	0,0
Sulawesi Tengah	196	59	32	0,0	27	3,7
Sulawesi Selatan	452	211	154	4,5	57	5,3
Sulawesi Tenggara	281	93	33	0,0	60	5,0
Gorontalo	93	46	17	0,0	29	0,0
Sulawesi Barat	94	36	24	4,2	12	0,0
Maluku	199	40	23	0,0	17	0,0
Maluku Utara	129	29	7	0,0	22	4,5
Papua Barat	157	12	3	0,0	9	11,1
Papua	356	51	19	0,0	32	0,0
INDONESIA	9.831	4.150	2.005	2,9	2.145	5,6

Catatan : Kesesuaian standar berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 2014

Tabel 3.1. 7 Proporsi Kesesuaian Tenaga Kesehatan Puskesmas Terpencil/Sangat Terpencil Berdasarkan Karakteristik Wilayah Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Memiliki SK T/ST n	Rawat Inap		Non rawat inap	
			Jumlah	Sesuai standar (%)	Jumlah	Sesuai standar (%)
Aceh	347	89	50	4,0	39	2,6
Sumatera Utara	571	89	29	0,0	60	0,0
Sumatera Barat	271	49	34	0,0	15	0,0
Riau	216	39	26	0,0	13	0,0
Jambi	193	43	16	0,0	27	3,7
Sumatera Selatan	328	29	14	0,0	15	6,7
Bengkulu	179	34	6	0,0	28	0,0
Lampung	299	41	25	0,0	16	0,0
Bangka Belitung	63	4	4	0,0	0	NA
Kepulauan Riau	80	26	20	0,0	6	0,0
DKI Jakarta	313	0	NA	NA	NA	NA
Jawa Barat	1.069	45	16	0,0	29	0,0
Jawa Tengah	876	5	3	0,0	2	0,0
DI Yogyakarta	121	0	NA	NA	0	NA
Jawa Timur	964	10	8	0,0	2	0,0
Banten	233	0	NA	NA	0	NA
Bali	120	0	NA	NA	0	NA
Nusa Tenggara Barat	161	34	31	6,5	3	0,0
Nusa Tenggara Timur	374	275	155	0,6	120	2,5
Kalimantan Barat	241	109	75	0,0	34	0,0
Kalimantan Tengah	197	71	41	0,0	30	3,3
Kalimantan Selatan	232	43	15	0,0	28	3,6
Kalimantan Timur	178	39	31	6,5	8	0,0
Kalimantan Utara	55	20	11	0,0	9	0,0
Sulawesi Utara	193	30	18	0,0	12	0,0
Sulawesi Tengah	196	85	46	2,2	39	2,6
Sulawesi Selatan	452	94	68	0,0	26	0,0
Sulawesi Tenggara	281	126	45	0,0	81	1,2
Gorontalo	93	23	3	0,0	20	0,0
Sulawesi Barat	94	35	21	0,0	14	0,0
Maluku	199	106	29	3,4	77	0,0
Maluku Utara	129	64	26	0,0	38	0,0
Papua Barat	157	91	27	0,0	64	0,0
Papua	356	198	65	0,0	133	0,0
INDONESIA	9.831	1.946	958	0,9	988	1,0

Tabel 3.1. 8 Proporsi Puskesmas Tanpa Dokter Berdasarkan Karakteristik Wilayah Menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Keberadaan tenaga dokter di puskesmas					
		Ada	%	Tidak ada	%	Jumlah dokter	Rasio
Aceh	347	336	96,8	11	3,2	809	2,33
Sumatera Utara	571	539	94,4	32	5,6	1.493	2,61
Sumatera Barat	271	262	96,7	9	3,3	613	2,26
Riau	216	210	97,2	6	2,8	714	3,31
Jambi	193	187	96,9	6	3,1	402	2,08
Sumatera Selatan	328	296	90,2	32	9,8	567	1,73
Bengkulu	179	161	89,9	18	10,1	262	1,46
Lampung	299	286	95,7	13	4,3	645	2,16
Bangka Belitung	63	62	98,4	1	1,6	176	2,79
Kepulauan Riau	80	77	96,3	3	3,8	313	3,91
DKI Jakarta	313	310	99,0	3	1,0	1.635	5,22
Jawa Barat	1.069	1.048	98,0	21	2,0	2.397	2,24
Jawa Tengah	876	868	99,1	8	0,9	2.194	2,50
DI Yogyakarta	121	121	100,0	0	0,0	438	3,62
Jawa Timur	964	941	97,6	23	2,4	2.065	2,14
Banten	233	229	98,3	4	1,7	608	2,61
Bali	120	120	100,0	0	0,0	480	4,00
Nusa Tenggara Barat	161	160	99,4	1	0,6	372	2,31
Nusa Tenggara Timur	374	308	82,4	66	17,6	426	1,14
Kalimantan Barat	241	231	95,9	10	4,1	401	1,66
Kalimantan Tengah	197	173	87,8	24	12,2	287	1,46
Kalimantan Selatan	232	218	94,0	14	6,0	457	1,97
Kalimantan Timur	178	171	96,1	7	3,9	451	2,53
Kalimantan Utara	55	54	98,2	1	1,8	113	2,05
Sulawesi Utara	193	179	92,7	14	7,3	517	2,68
Sulawesi Tengah	196	169	86,2	27	13,8	264	1,35
Sulawesi Selatan	452	423	93,6	29	6,4	809	1,79
Sulawesi Tenggara	281	218	77,6	63	22,4	309	1,10
Gorontalo	93	86	92,5	7	7,5	130	1,40
Sulawesi Barat	94	81	86,2	13	13,8	125	1,33
Maluku	199	139	69,8	60	30,2	198	0,99
Maluku Utara	129	115	89,1	14	10,9	175	1,36
Papua Barat	157	110	70,1	47	29,9	169	1,08
Papua	356	201	56,5	155	43,5	320	0,90
INDONESIA	9.831	9.089	92,5	742	7,5	21.334	2,17

Tabel 3.1. 9 Proporsi Puskesmas Tanpa Dokter Menurut Karakteristik Wilayah Berdasarkan Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Memiliki SK wilayah (n)	Puskesmas perkotaan (%)		Puskesmas perdesaan (%)		Puskesmas T/ST (%)	
			Rawat inap	Non rawat inap	Rawat inap	Non rawat inap	Rawat inap	Non rawat inap
Aceh	347	327	0,0	0,0	2,4	1,1	6,0	7,7
Sumatera Utara	571	484	2,9	0,0	2,4	3,4	0,0	16,7
Sumatera Barat	271	235	0,0	0,0	0,0	7,8	5,9	0,0
Riau	216	191	0,0	0,0	3,9	2,3	3,8	7,7
Jambi	193	182	0,0	0,0	4,3	4,3	6,3	3,7
Sumatera Selatan	328	291	0,0	6,4	6,3	14,1	14,3	13,3
Bengkulu	179	135	0,0	4,3	3,8	18,4	0,0	10,7
Lampung	299	245	0,0	3,0	3,7	5,7	4,0	6,3
Kep. Bangka Belitung	63	59	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	NA
Kepulauan Riau	80	79	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	16,7
DKI Jakarta	313	94	0,0	3,4	NA	0,0	NA	NA
Jawa Barat	1.069	932	0,0	0,3	1,4	2,8	0,0	13,8
Jawa Tengah	876	838	1,1	0,0	0,8	1,6	0,0	0,0
DI Yogyakarta	121	102	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	NA
Jawa Timur	964	823	0,9	1,5	2,9	2,6	0,0	0,0
Banten	233	212	0,0	0,0	0,0	5,1	NA	NA
Bali	120	109	0,0	0,0	0,0	0,0	NA	NA
Nusa Tenggara Barat	161	151	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
Nusa Tenggara Timur	374	351	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	25,0
Kalimantan Barat	241	216	0,0	2,6	0,0	0,0	5,3	8,8
Kalimantan Tengah	197	191	0,0	0,0	11,8	7,5	22,0	26,7
Kalimantan Selatan	232	223	0,0	0,0	3,2	6,7	13,3	14,3
Kalimantan Timur	178	147	0,0	4,8	2,6	6,3	9,7	0,0
Kalimantan Utara	55	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
Sulawesi Utara	193	158	0,0	0,0	2,8	4,7	16,7	8,3
Sulawesi Tengah	196	170	25,0	5,6	9,4	3,7	15,2	20,5
Sulawesi Selatan	452	410	1,9	0,0	3,9	10,5	8,8	26,9
Sulawesi Tenggara	281	257	8,3	3,8	12,1	16,7	17,8	40,7
Gorontalo	93	92	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	15,0
Sulawesi Barat	94	87	0,0	0,0	4,2	50,0	4,8	35,7
Maluku	199	169	0,0	0,0	30,4	23,5	27,6	42,9
Maluku Utara	129	108	0,0	0,0	14,3	13,6	7,7	13,2
Papua Barat	157	131	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	37,5
Papua	356	291	0,0	9,1	15,8	34,4	26,2	66,9
INDONESIA	9.831	8.543	1,0	1,2	3,2	5,6	11,8	28,3

Tabel 3.1. 10 Jumlah Puskesmas Terakreditasi menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Jumlah puskesmas terakreditasi (n)	Tingkat akreditasi							
			Dasar		Madya		Utama		Paripurna	
			n	%	n	%	n	%	n	%
Aceh	347	255	87	34,1	153	60,0	15	5,9	0	0,0
Sumatera Utara	571	402	188	46,8	197	49,0	16	4,0	1	0,2
Sumatera Barat	271	246	80	32,5	147	59,8	19	7,7	0	0,0
Riau	216	174	61	35,1	97	55,7	16	9,2	0	0,0
Jambi	193	165	71	43,0	84	50,9	10	6,1	0	0,0
Sumatera Selatan	328	262	89	34,0	148	56,5	22	8,4	3	1,1
Bengkulu	179	136	78	57,4	57	41,9	1	0,7	0	0,0
Lampung	299	280	40	14,3	200	71,4	39	13,9	1	0,4
Bangka Belitung	63	60	13	21,7	39	65,0	8	13,3	0	0,0
Kepulauan Riau	80	70	24	34,3	33	47,1	13	18,6	0	0,0
DKI Jakarta	313	156	13	8,3	92	59,0	32	20,5	19	12,2
Jawa Barat	1.069	774	210	27,1	473	61,1	85	11,0	6	0,8
Jawa Tengah	876	867	183	21,1	553	63,8	124	14,3	7	0,8
DI Yogyakarta	121	121	12	9,9	53	43,8	50	41,3	6	5,0
Jawa Timur	964	938	135	14,4	583	62,2	211	22,5	9	1,0
Banten	233	196	59	30,1	124	63,3	13	6,6	0	0,0
Bali	120	119	22	18,5	76	63,9	20	16,8	1	0,8
Nusa Tenggara Barat	161	135	47	34,8	72	53,3	15	11,1	1	0,7
Nusa Tenggara Timur	374	271	160	59,0	105	38,7	6	2,2	0	0,0
Kalimantan Barat	241	188	78	41,5	102	54,3	8	4,3	0	0,0
Kalimantan Tengah	197	136	71	52,2	55	40,4	9	6,6	1	0,7
Kalimantan Selatan	232	198	92	46,5	92	46,5	13	6,6	1	0,5
Kalimantan Timur	178	139	54	38,8	73	52,5	12	8,6	0	0,0
Kalimantan Utara	55	41	22	53,7	15	36,6	4	9,8	0	0,0
Sulawesi Utara	193	112	67	59,8	45	40,2	0	0,0	0	0,0
Sulawesi Tengah	196	151	70	46,4	75	49,7	6	4,0	0	0,0
Sulawesi Selatan	452	406	133	32,8	231	56,9	39	9,6	3	0,7
Sulawesi Tenggara	281	160	75	46,9	83	51,9	1	0,6	1	0,6
Gorontalo	93	78	24	30,8	44	56,4	8	10,3	2	2,6
Sulawesi Barat	94	50	16	32,0	30	60,0	4	8,0	0	0,0
Maluku	199	89	54	60,7	33	37,1	2	2,2	0	0,0
Maluku Utara	129	74	39	52,7	34	45,9	1	1,4	0	0,0
Papua Barat	157	50	27	54,0	22	44,0	1	2,0	0	0,0
Papua	356	70	40	57,1	27	38,6	3	4,3	0	0,0
INDONESIA	9.831	7.569	2.434	32,2	4.247	56,1	826	10,9	62	0,8

Tabel 3.1. 11 Jumlah Klinik Terakreditasi menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah klinik N	Tingkat akreditasi							
		Dasar		Utama		Paripurna		Lainnya	
		N	%	n	%	n	%	n	%
INDONESIA	416	5	41,7					4	33,3

Tabel 3.1.12 Rerata Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Berdasarkan Kriteria Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Rerata ketersediaan (%)	Rerata ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)			
			Tanpa SK	Perkotaan	Perdesaan	Terpencil/ Sangat Terpencil
Aceh	347	81,21	84,5	83,0	80,3	80,8
Sumatera Utara	571	78,69	74,0	80,4	80,2	76,6
Sumatera Barat	271	85,79	83,5	88,5	86,5	82,8
Riau	216	84,10	78,8	86,1	84,7	82,8
Jambi	193	85,18	83,6	85,9	85,2	84,7
Sumatera Selatan	328	79,13	78,8	80,6	77,9	81,9
Bengkulu	179	78,60	81,1	80,0	77,2	76,6
Lampung	299	82,17	82,8	81,4	82,1	81,8
Bangka Belitung	63	87,86	84,0	87,7	88,8	88,8
Kepulauan Riau	80	88,38	90,0	88,5	88,1	87,7
DKI Jakarta	313	81,73	81,1	83,4	75,0	NA
Jawa Barat	1.069	85,94	85,5	85,4	86,2	89,0
Jawa Tengah	876	87,39	89,3	87,7	87,2	85,0
DI Yogyakarta	121	90,50	91,2	88,5	91,3	NA
Jawa Timur	964	88,53	89,1	87,3	88,8	92,0
Banten	233	82,79	83,8	84,9	79,8	NA
Bali	120	86,92	83,6	85,4	87,7	NA
Nusa Tenggara Barat	161	91,27	86,0	92,2	92,0	90,7
Nusa Tenggara Timur	374	81,28	77,4	85,0	80,6	81,1
Kalimantan Barat	241	86,93	87,4	84,9	86,6	87,8
Kalimantan Tengah	197	82,99	79,2	82,8	83,9	82,5
Kalimantan Selatan	232	87,24	89,4	88,3	86,7	86,3
Kalimantan Timur	178	86,66	88,9	88,2	85,4	84,0
Kalimantan Utara	55	81,55	85,0	82,5	81,2	80,5
Sulawesi Utara	193	74,56	67,9	77,1	76,1	73,7
Sulawesi Tengah	196	82,35	82,9	81,7	81,7	82,6
Sulawesi Selatan	452	82,94	81,4	81,9	83,4	83,9
Sulawesi Tenggara	281	81,48	79,4	87,1	82,5	80,0
Gorontalo	93	85,65	85,0	86,5	86,4	84,1
Sulawesi Barat	94	88,72	87,1	91,3	89,2	88,3
Maluku	199	73,89	73,8	84,1	73,6	71,7
Maluku Utara	129	79,46	85,0	82,0	78,8	77,5
Papua Barat	157	74,11	63,3	84,1	72,5	74,4
Papua	356	71,95	66,6	85,5	77,7	69,1
INDONESIA	9.831	83,42	81,4	85,1	84,6	80,1

Catatan : Obat dan vaksin indikator 2015-2019 terdiri dari 20 item obat dan vaksin

Tabel 3.1. 13 Proporsi Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Puskesmas dengan ketersediaan $\geq 80\%$ (%)	(%) Puskesmas dengan ketersediaan $\geq 80\%$			Terpencil/ Sangat Terpencil
			Tanpa SK	Perkotaan	Perdesaan	
Aceh	347	65,1	75,0	69,2	64,7	60,7
Sumatera Utara	571	61,1	48,3	64,7	65,6	55,1
Sumatera Barat	271	81,9	75,0	86,5	84,3	75,5
Riau	216	78,7	56,0	87,7	80,0	76,9
Jambi	193	77,2	72,7	76,1	76,3	81,4
Sumatera Selatan	328	59,8	59,5	62,6	55,2	75,9
Bengkulu	179	56,4	63,3	68,2	51,4	50,0
Lampung	299	69,6	72,2	69,2	69,1	68,3
Bangka Belitung	63	88,9	60,0	90,5	90,9	100,0
Kepulauan Riau	80	87,5	100,0	91,9	75,0	88,5
DKI Jakarta	313	67,4	64,4	75,0	50,0	NA
Jawa Barat	1.069	81,3	78,8	80,0	82,5	88,9
Jawa Tengah	876	86,5	86,8	87,1	86,5	60,0
DI Yogyakarta	121	97,5	95,2	93,8	100,0	NA
Jawa Timur	964	89,8	93,6	87,1	90,1	90,0
Banten	233	74,2	76,2	80,2	66,7	NA
Bali	120	86,7	81,8	75,9	91,3	NA
Nusa Tenggara Barat	161	91,9	90,0	88,0	94,6	88,2
Nusa Tenggara Timur	374	67,9	56,5	82,4	64,3	67,6
Kalimantan Barat	241	85,5	92,0	82,0	86,0	85,3
Kalimantan Tengah	197	70,1	50,0	67,4	71,6	71,8
Kalimantan Selatan	232	88,4	88,9	89,8	86,0	93,0
Kalimantan Timur	178	89,3	100,0	90,7	88,9	79,5
Kalimantan Utara	55	69,1	100,0	68,8	58,8	75,0
Sulawesi Utara	193	45,6	34,3	55,1	48,1	36,7
Sulawesi Tengah	196	72,4	84,6	69,2	71,2	70,6
Sulawesi Selatan	452	75,9	71,4	74,3	78,2	74,5
Sulawesi Tenggara	281	67,6	54,2	84,2	71,0	62,7
Gorontalo	93	80,6	100,0	91,3	84,8	60,9
Sulawesi Barat	94	90,4	71,4	93,8	88,9	94,3
Maluku	199	45,2	43,3	73,9	42,5	40,6
Maluku Utara	129	63,6	85,7	73,3	65,5	53,1
Papua Barat	157	50,3	23,1	78,6	33,3	51,6
Papua	356	50,0	47,7	78,6	54,9	43,4
INDONESIA	9.831	74,7	69,5	79,4	78,0	65,5

Catatan : Obat dan vaksin indikator 2015-2019 terdiri dari 20 item obat dan vaksin

Tabel 3.1. 14 Rerata Persentase Puskesmas berdasarkan Karakteristik Wilayah yang Memiliki Ketersediaan Obat dan Vaksin Indikator (20 item), Rifaskes 2019

No	Nama Obat/Vaksin	Jumlah puskesmas N	Tersedia %	Rerata ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)			
				Tanpa SK	Perkotaan	Perdesaan	T/ST
1	Efinefrin / Adrenalin injeksi	9.831	84,2	82,0	87,9	86,1	77,0
2	Albendazol tablet	9.831	91,6	91,7	93,0	91,4	90,1
3	Amoksisilin tablet	9.831	97,0	97,1	98,2	96,8	96,1
4	Amoksisilin sirup	9.831	89,0	91,4	90,2	88,6	86,7
5	Deksametason tablet	9.831	94,5	94,7	95,8	94,9	91,8
6	Diazepam tablet	9.831	70,2	69,3	76,0	70,9	62,2
7	Furosemid tablet	9.831	90,8	88,0	92,4	93,6	84,7
8	Garam oralit serbuk	9.831	91,6	91,8	94,3	91,4	88,3
9	Glibenklamid tablet	9.831	87,2	85,6	88,3	88,7	83,5
10	Kaptopril tablet	9.831	92,0	92,1	94,0	92,0	89,4
11	Magnesium Sulfat injeksi	9.831	57,2	49,5	58,9	61,7	50,5
12	Metilergometrin injeksi	9.831	72,2	62,8	71,2	77,3	68,8
13	Obat anti tuberculosis	9.831	87,9	85,8	92,9	89,3	80,0
14	Oksitosin injeksi	9.831	83,6	71,6	81,0	88,7	84,1
15	Parasetamol tablet	9.831	97,0	96,5	98,3	97,0	95,8
16	Tablet tambah darah	9.831	53,7	53,0	61,9	51,5	48,4
17	Fitomenadion injeksi (vitamin K)	9.831	84,7	83,1	84,2	87,0	81,6
18	Vaksin BCG	9.831	96,7	95,8	97,8	97,5	94,5
19	Vaksin TT	9.831	50,4	48,5	47,6	50,3	55,5
20	Vaksin DPT Hb/ Vaksin DPT Hb HiB	9.831	96,6	97,1	98,4	97,5	93,8

Tabel 3.1.15 Rerata Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas Berdasarkan Kriteria Wilayah menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Rerata ketersediaan (%)	Rerata ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)			
			Tanpa SK	Perkotaan	Perdesaan	Terpencil/Sangat Terpencil
Aceh	347	84,48	88,6	87,2	83,3	83,8
Sumatera Utara	571	79,88	75,5	82,7	80,8	77,0
Sumatera Barat	271	88,69	86,6	91,4	89,2	85,9
Riau	216	85,73	82,2	87,2	86,1	84,9
Jambi	193	88,28	87,5	88,9	88,2	88,0
Sumatera Selatan	328	82,06	81,2	82,8	81,2	85,1
Bengkulu	179	81,40	83,4	80,9	81,1	79,4
Lampung	299	85,48	84,8	86,4	85,3	85,8
Bangka Belitung	63	91,02	90,3	90,5	91,3	92,1
Kepulauan Riau	80	90,93	91,4	91,3	88,9	91,6
DKI Jakarta	313	87,12	86,8	87,9	84,3	NA
Jawa Barat	1.069	87,79	86,8	87,4	88,1	90,9
Jawa Tengah	876	90,08	91,6	90,4	89,9	86,9
DI Yogyakarta	121	95,28	93,9	94,6	96,0	NA
Jawa Timur	964	90,37	91,0	89,6	90,6	91,7
Banten	233	85,94	88,4	87,2	83,9	NA
Bali	120	86,74	87,0	87,2	86,5	NA
Nusa Tenggara Barat	161	92,32	89,4	92,9	93,3	90,2
Nusa Tenggara Timur	374	81,91	78,0	86,7	82,7	81,5
Kalimantan Barat	241	88,11	90,4	84,7	88,7	88,9
Kalimantan Tengah	197	84,42	82,4	84,1	85,6	83,6
Kalimantan Selatan	232	90,84	92,7	91,1	90,7	90,4
Kalimantan Timur	178	86,92	89,1	89,0	86,0	83,5
Kalimantan Utara	55	86,49	87,1	88,2	88,2	83,6
Sulawesi Utara	193	76,34	71,2	79,7	76,0	77,9
Sulawesi Tengah	196	85,19	87,0	85,3	86,1	84,0
Sulawesi Selatan	452	86,06	83,9	85,1	86,5	87,1
Sulawesi Tenggara	281	82,23	79,5	88,7	82,4	80,7
Gorontalo	93	85,75	94,3	89,3	87,5	78,3
Sulawesi Barat	94	87,54	86,1	91,6	88,8	84,7
Maluku	199	76,50	75,9	87,1	76,4	74,4
Maluku Utara	129	80,53	83,8	84,8	81,9	77,9
Papua Barat	157	76,60	68,7	84,9	76,0	76,4
Papua	356	74,27	68,2	85,4	79,3	72,6
INDONESIA	9.831	85,65	84,1	87,5	86,9	81,8

Catatan : Obat indikator 2020-2024 terdiri dari 40 item obat sedangkan yang dihitung dalam Rifaskes 2019 hanya 35 item obat

Tabel 3.1. 16 Proporsi Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar Berdasarkan Ketersediaan SK menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Puskesmas dengan ketersediaan $\geq 80\%$ (%)	(%) Puskesmas dengan ketersediaan $\geq 80\%$			
			Tanpa SK	Perkotaan	Perdesaan	Terpencil/ Sangat Terpencil
Aceh	347	74,9	85,0	84,6	69,4	76,4
Sumatera Utara	571	63,9	50,6	69,1	68,0	57,3
Sumatera Barat	271	87,5	77,8	96,2	88,8	81,6
Riau	216	80,1	64,0	87,7	82,1	74,4
Jambi	193	86,0	81,8	84,8	84,9	90,7
Sumatera Selatan	328	69,2	67,6	73,7	64,4	82,8
Bengkulu	179	67,0	67,3	72,7	64,9	67,6
Lampung	299	82,9	77,8	84,6	81,6	92,7
Bangka Belitung	63	96,8	100,0	95,2	97,0	100,0
Kepulauan Riau	80	90,0	100,0	94,6	81,3	88,5
DKI Jakarta	313	87,2	86,8	88,0	100,0	NA
Jawa Barat	1.069	85,8	81,0	84,2	88,1	91,1
Jawa Tengah	876	91,0	94,7	93,2	89,8	80,0
DI Yogyakarta	121	100,0	100,0	100,0	100,0	NA
Jawa Timur	964	90,8	93,6	89,6	90,4	100,0
Banten	233	83,7	95,2	85,3	79,2	NA
Bali	120	84,2	90,9	82,8	83,8	NA
Nusa Tenggara Barat	161	94,4	100,0	92,0	96,7	88,2
Nusa Tenggara Timur	374	65,0	47,8	88,2	66,7	63,3
Kalimantan Barat	241	84,2	96,0	68,0	87,7	87,2
Kalimantan Tengah	197	73,1	66,7	69,6	75,7	73,2
Kalimantan Selatan	232	94,0	100,0	94,9	92,6	95,3
Kalimantan Timur	178	86,5	96,8	94,4	81,5	74,4
Kalimantan Utara	55	85,5	100,0	93,8	88,2	75,0
Sulawesi Utara	193	49,2	31,4	69,4	43,0	53,3
Sulawesi Tengah	196	78,1	92,3	80,8	81,4	70,6
Sulawesi Selatan	452	84,5	78,6	82,9	85,8	86,2
Sulawesi Tenggara	281	68,0	62,5	86,8	69,9	61,9
Gorontalo	93	80,6	100,0	91,3	87,0	56,5
Sulawesi Barat	94	80,9	71,4	100,0	83,3	71,4
Maluku	199	54,3	56,7	73,9	52,5	50,0
Maluku Utara	129	67,4	81,0	80,0	69,0	59,4
Papua Barat	157	52,9	26,9	85,7	33,3	52,7
Papua	356	52,5	41,5	78,6	62,7	48,0
INDONESIA	9.831	79,4	76,2	85,1	82,1	68,7

Catatan : Obat indikator 2020-2024 terdiri dari 40 item obat sedangkan yang dihitung dalam Rifaskes 2019 hanya 35 item obat

Tabel 3.1. 17 Rerata Persentase Puskesmas Berdasarkan Karakteristik Wilayah yang Memiliki Ketersediaan Obat Esensial (35 obat), Rifaskes 2019

No	Nama Obat/Vaksin	Jumlah puskesmas N	Tersedia (%)	Rerata ketersediaan obat di puskesmas (%)			
				Tanpa SK	Perkotaan	Perdesaan	T/ST
1	Albendazol tab/Pirantel tablet	9.831	95,9	95,3	96,3	96,0	95,7
2	Allopurinol tablet	9.831	96,4	96,2	98,2	96,7	93,7
3	Amoksisilin 500 mg tablet	9.831	97,0	97,1	98,2	96,8	96,1
4	Amoksisilin sirup	9.831	89,0	91,4	90,2	88,6	86,7
5	Antasida DOEN I tablet kunyah kombinasi/Antasida DOEN II Suspensi kombinasi	9.831	95,8	96,5	97,5	95,7	93,5
6	Asiklovir 400 mg tablet/kapsul	9.831	94,7	93,8	96,8	95,6	90,9
7	Betametason salep	9.831	93,2	93,4	94,8	93,3	90,8
8	Siprofloksasin tablet	9.831	80,2	78,2	83,0	81,6	74,7
9	Diazepam injeksi 5 mg/mL	9.831	66,9	57,9	66,4	71,8	63,3
10	Diazepam tablet	9.831	70,2	69,3	76,0	70,9	62,2
11	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0.1% (sebagai HCL)	9.831	84,2	82,0	87,9	86,1	77,0
12	Fitomenadion (Vitamin K) injeksi	9.831	84,7	83,1	84,2	87,0	81,6
13	Furosemid 40 mg tablet /Hidroklorotiazid (HCT)	9.831	95,1	93,6	96,8	96,9	90,5
14	Garam oralit	9.831	91,6	91,8	94,3	91,4	88,3
15	Glibenklamid/Metformin tablet	9.831	96,7	95,4	97,9	97,9	93,3
16	Ibuprofen tablet/kapsul	9.831	81,9	83,4	82,7	82,2	79,3
17	Kaptopril tablet	9.831	92,0	92,1	94,0	92,0	89,4
18	Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi/Kotrimoksazol Suspensi	9.831	96,0	94,9	97,4	96,4	93,9
19	Lidokain injeksi	9.831	94,1	93,1	93,7	95,1	93,0
20	Magnesium Sulfat injeksi 20%	9.831	57,2	49,5	58,9	61,7	50,5
21	Metilergometrin Maleat injeksi 0.200 mg-1 ml	9.831	72,2	62,8	71,2	77,3	68,8
22	Natrium Diklofenak tablet	9.831	89,5	89,7	92,0	89,7	86,0
23	Obat Anti Tuberculosis Dewasa	9.831	87,9	85,8	92,9	89,3	80,0
24	Oksitosin injeksi	9.831	83,6	71,6	81,0	88,7	84,1
25	Parasetamol 500 mg tablet	9.831	97,0	96,5	98,3	97,0	95,8
26	Parasetamol sirup 120 mg/5 ml	9.831	93,0	94,1	94,5	94,1	88,1
27	Prednison 5 mg tablet	9.831	84,4	84,3	82,1	85,6	85,0
28	Ranitidin tablet	9.831	85,0	85,6	85,5	84,2	85,4
29	Salbutamol tablet	9.831	95,1	94,7	96,5	95,2	93,4
30	Salep/Tetes mata antibiotik	9.831	90,1	90,9	92,5	91,1	84,5
31	Simvastatin tablet	9.831	88,4	88,0	91,2	89,7	82,5
32	Tablet Tambah Darah	9.831	53,7	53,0	61,9	51,5	48,4
33	Triheksifenidil tablet	9.831	51,2	47,7	56,7	59,8	28,5
34	Vitamin B6 (Piridoksin) tablet	9.831	93,4	82,6	87,7	82,7	80,3
35	Zinc tablet	9.831	90,3	89,4	92,5	90,2	88,2

Tabel 3.1. 18 Proporsi Klinik Sesuai Standar Ketenagaan di Klinik Pratama, Rifaskes 2019

Standar ketenagaan	Jumlah dokter dan dokter gigi	
	n	%
Tidak sesuai standar	48	12,5
Sesuai standar	335	87,5
Total	383	100,0

Tabel 3.1. 19 Proporsi Klinik Sesuai Standar Ketenagaan di Klinik Utama, Rifaskes 2019

Standar ketenagaan	Jumlah dokter dan dokter spesialis	
	n	%
Tidak sesuai standar	15	45,5
Sesuai standar	18	54,5
Total	33	100,0

Tabel 3.1. 20 Proporsi Klinik Sesuai Standar Ketenagaan (Pelayanan Kedokteran Gigi) di Klinik Utama, Rifaskes 2019

Standar ketenagaan	Jumlah dokter gigi dan dokter gigi spesialis	
	n	%
Tidak sesuai standar	27	81,8
Sesuai standar	6	18,2
Total	33	100,0

3.2 Indikator Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024

Tabel 3.2.1 Proporsi Kabupaten/kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
Aceh	23	3	13,0	20	87,0
Sumatera Utara	33	3	9,1	30	90,9
Sumatera Barat	19	4	21,1	15	78,9
Riau	12	3	25,0	9	75,0
Jambi	11	1	9,1	10	90,9
Sumatera Selatan	17	1	5,9	16	94,1
Bengkulu	10	2	20,0	8	80,0
Lampung	15	3	20,0	12	80,0
Bangka Belitung	7	3	42,9	4	57,1
Kepulauan Riau	7	0	0,0	7	100,0
DKI Jakarta	6	2	33,3	4	66,7
Jawa Barat	27	3	11,1	24	88,9
Jawa Tengah	35	9	25,7	26	74,3
DI Yogyakarta	5	1	20,0	4	80,0
Jawa Timur	38	12	31,6	26	68,4
Banten	8	3	37,5	5	62,5
Bali	9	2	22,2	7	77,8
Nusa Tenggara Barat	10	1	10,0	9	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0	22	100,0
Kalimantan Barat	14	1	7,1	13	92,9
Kalimantan Tengah	14	3	21,4	11	78,6
Kalimantan Selatan	13	2	15,4	11	84,6
Kalimantan Timur	10	1	10,0	9	90,0
Kalimantan Utara	5	0	0,0	5	100,0
Sulawesi Utara	15	1	6,7	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	0	0,0	13	100,0
Sulawesi Selatan	24	7	29,2	17	70,8
Sulawesi Tenggara	17	0	0,0	17	100,0
Gorontalo	6	0	0,0	6	100,0
Sulawesi Barat	6	2	33,3	4	66,7
Maluku	11	0	0,0	11	100,0
Maluku Utara	10	1	10,0	9	90,0
Papua Barat	13	0	0,0	13	100,0
Papua	29	1	3,4	28	96,6
INDONESIA	514	75	14,6	439	85,4

Tabel 3.2.2 Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Kesehatan Olah Raga menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Kabupaten kota melaksanakan kesehatan olah raga			
		Melaksanakan kesehatan olah raga		Tidak melaksanakan kesehatan olah raga	
		n	%	n	%
Aceh	23	7	30,4	16	69,6
Sumatera Utara	33	4	12,1	29	87,9
Sumatera Barat	19	11	57,9	8	42,1
Riau	12	7	58,3	5	41,7
Jambi	11	4	36,4	7	63,6
Sumatera Selatan	17	2	11,8	15	88,2
Bengkulu	10	1	10,0	9	90,0
Lampung	15	3	20,0	12	80,0
Bangka Belitung	7	3	42,9	4	57,1
Kepulauan Riau	7	2	28,6	5	71,4
DKI Jakarta	6	4	66,7	2	33,3
Jawa Barat	27	8	29,6	19	70,4
Jawa Tengah	35	9	25,7	26	74,3
DI Yogyakarta	5	2	40,0	3	60,0
Jawa Timur	38	17	44,7	21	55,3
Banten	8	5	62,5	3	37,5
Bali	9	3	33,3	6	66,7
Nusa Tenggara Barat	10	4	40,0	6	60,0
Nusa Tenggara Timur	22	3	13,6	19	86,4
Kalimantan Barat	14	2	14,3	12	85,7
Kalimantan Tengah	14	5	35,7	9	64,3
Kalimantan Selatan	13	4	30,8	9	69,2
Kalimantan Timur	10	4	40,0	6	60,0
Kalimantan Utara	5	1	20,0	4	80,0
Sulawesi Utara	15	1	6,7	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	1	7,7	12	92,3
Sulawesi Selatan	24	13	54,2	11	45,8
Sulawesi Tenggara	17	5	29,4	12	70,6
Gorontalo	6	2	33,3	4	66,7
Sulawesi Barat	6	2	33,3	4	66,7
Maluku	11	3	27,3	8	72,7
Maluku Utara	10	2	20,0	8	80,0
Papua Barat	13	0	0,0	13	100,0
Papua	29	0	0,0	29	100,0
INDONESIA	514	144	28,0	370	72,0

Tabel 3.2.3 Proporsi Kabupaten/kota yang Melaksanakan Audit Maternal Perinatal/ AMP menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Melaksanakan audit maternal perinatal/ AMP	
		n	%
Aceh	23	19	82,6
Sumatera Utara	33	24	72,7
Sumatera Barat	19	14	73,7
Riau	12	10	83,3
Jambi	11	10	90,9
Sumatera Selatan	17	16	94,1
Bengkulu	10	8	80,0
Lampung	15	14	93,3
Bangka Belitung	7	6	85,7
Kepulauan Riau	7	6	85,7
DKI Jakarta	6	5	83,3
Jawa Barat	27	23	85,2
Jawa Tengah	35	35	100,0
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	35	92,1
Banten	8	6	75,0
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	20	90,9
Kalimantan Barat	14	12	85,7
Kalimantan Tengah	14	8	57,1
Kalimantan Selatan	13	11	84,6
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	13	86,7
Sulawesi Tengah	13	11	84,6
Sulawesi Selatan	24	21	87,5
Sulawesi Tenggara	17	13	76,5
Gorontalo	6	5	83,3
Sulawesi Barat	6	5	83,3
Maluku	11	4	36,4
Maluku Utara	10	5	50,0
Papua Barat	13	6	46,2
Papua	29	8	27,6
INDONESIA	514	409	79,6

Tabel 3.2.4 Proporsi Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin (Catin) menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Pelayanan Kespro bagi Catin			
		Melaksanakan semua pelayanan kespro		Memberikan pelayanan imunisasi TT	
		n	%	n	%
Aceh	347	300	86,5	333	96,0
Sumatera Utara	571	379	66,4	419	73,4
Sumatera Barat	271	258	95,2	266	98,2
Riau	216	197	91,2	212	98,1
Jambi	193	174	90,2	187	96,9
Sumatera Selatan	328	257	78,4	296	90,2
Bengkulu	179	160	89,4	172	96,1
Lampung	299	272	91,0	292	97,7
Bangka Belitung	63	61	96,8	63	100,0
Kepulauan Riau	80	73	91,3	78	97,5
DKI Jakarta	313	96	30,7	134	42,8
Jawa Barat	1.069	959	89,7	1.050	98,2
Jawa Tengah	876	833	95,1	857	97,8
DI Yogyakarta	121	120	99,2	121	100,0
Jawa Timur	964	919	95,3	939	97,4
Banten	233	196	84,1	222	95,3
Bali	120	58	48,3	76	63,3
Nusa Tenggara Barat	161	133	82,6	143	88,8
Nusa Tenggara Timur	374	106	28,3	174	46,5
Kalimantan Barat	241	210	87,1	234	97,1
Kalimantan Tengah	197	163	82,7	181	91,9
Kalimantan Selatan	232	224	96,6	232	100,0
Kalimantan Timur	178	166	93,3	177	99,4
Kalimantan Utara	55	42	76,4	49	89,1
Sulawesi Utara	193	160	82,9	183	94,8
Sulawesi Tengah	196	172	87,8	188	95,9
Sulawesi Selatan	452	404	89,4	440	97,3
Sulawesi Tenggara	281	208	74,0	246	87,5
Gorontalo	93	86	92,5	92	98,9
Sulawesi Barat	94	82	87,2	91	96,8
Maluku	199	52	26,1	86	43,2
Maluku Utara	129	77	59,7	101	78,3
Papua Barat	157	46	29,3	66	42,0
Papua	356	78	21,9	118	33,1
INDONESIA	9.831	7.721	78,5	8.518	86,6

Tabel 3.2.5 Proporsi Puskesmas yang Melaksanakan MTBS menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas	Melaksanakan program MTBS	
	N	n	%
Aceh	347	312	89,9
Sumatera Utara	571	438	76,7
Sumatera Barat	271	267	98,5
Riau	216	201	93,1
Jambi	193	189	97,9
Sumatera Selatan	328	320	97,6
Bengkulu	179	166	92,7
Lampung	299	293	98,0
Bangka Belitung	63	62	98,4
Kepulauan Riau	80	73	91,3
DKI Jakarta	313	303	96,8
Jawa Barat	1.069	1.045	97,8
Jawa Tengah	876	866	98,9
DI Yogyakarta	121	118	97,5
Jawa Timur	964	927	96,2
Banten	233	230	98,7
Bali	120	119	99,2
Nusa Tenggara Barat	161	151	93,8
Nusa Tenggara Timur	374	301	80,5
Kalimantan Barat	241	209	86,7
Kalimantan Tengah	197	149	75,6
Kalimantan Selatan	232	223	96,1
Kalimantan Timur	178	169	94,9
Kalimantan Utara	55	48	87,3
Sulawesi Utara	193	113	58,5
Sulawesi Tengah	196	180	91,8
Sulawesi Selatan	452	378	83,6
Sulawesi Tenggara	281	193	68,7
Gorontalo	93	86	92,5
Sulawesi Barat	94	79	84,0
Maluku	199	169	84,9
Maluku Utara	129	124	96,1
Papua Barat	157	84	53,5
Papua	356	184	51,7
INDONESIA	9.831	8.769	89,2

Tabel 3.2.6 Proporsi Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan untuk Mendukung Kearif Gerak Perilaku Hidup Sehat menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Kab/Kota yang mendukung ke arah gerakan Perilaku Hidup Sehat	
		n	%
Aceh	23	17	73,9
Sumatera Utara	33	25	75,8
Sumatera Barat	19	19	100,0
Riau	12	10	83,3
Jambi	11	10	90,9
Sumatera Selatan	17	16	94,1
Bengkulu	10	8	80,0
Lampung	15	11	73,3
Bangka Belitung	7	6	85,7
Kepulauan Riau	7	5	71,4
DKI Jakarta	6	4	66,7
Jawa Barat	27	24	88,9
Jawa Tengah	35	31	88,6
DI Yogyakarta	5	4	80,0
Jawa Timur	38	30	78,9
Banten	8	7	87,5
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	8	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	15	68,2
Kalimantan Barat	14	9	64,3
Kalimantan Tengah	14	13	92,9
Kalimantan Selatan	13	10	76,9
Kalimantan Timur	10	9	90,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	12	80,0
Sulawesi Tengah	13	10	76,9
Sulawesi Selatan	24	19	79,2
Sulawesi Tenggara	17	10	58,8
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3
Maluku	11	10	90,9
Maluku Utara	10	10	100,0
Papua Barat	13	4	30,8
Papua	29	14	48,3
INDONESIA	514	404	78,6

Tabel 3.2.7 Proporsi Kabupaten/kota yang Memiliki Penetapan Tatanan Sehat dalam Menyelenggarakan Promosi Kesehatan untuk Meningkatkan PHBS Masyarakat menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Kab/kota yang memiliki tatanan sehat /ber PHBS	
		n	%
Aceh	23	16	69,6
Sumatera Utara	33	22	66,7
Sumatera Barat	19	14	73,7
Riau	12	8	66,7
Jambi	11	11	100,0
Sumatera Selatan	17	13	76,5
Bengkulu	10	8	80,0
Lampung	15	12	80,0
Bangka Belitung	7	6	85,7
Kepulauan Riau	7	5	71,4
DKI Jakarta	6	4	66,7
Jawa Barat	27	25	92,6
Jawa Tengah	35	31	88,6
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	33	86,8
Banten	8	5	62,5
Bali	9	8	88,9
Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
Nusa Tenggara Timur	22	14	63,6
Kalimantan Barat	14	11	78,6
Kalimantan Tengah	14	12	85,7
Kalimantan Selatan	13	8	61,5
Kalimantan Timur	10	7	70,0
Kalimantan Utara	5	3	60,0
Sulawesi Utara	15	10	66,7
Sulawesi Tengah	13	10	76,9
Sulawesi Selatan	24	21	87,5
Sulawesi Tenggara	17	12	70,6
Gorontalo	6	5	83,3
Sulawesi Barat	6	6	100,0
Maluku	11	5	45,5
Maluku Utara	10	10	100,0
Papua Barat	13	8	61,5
Papua	29	17	58,6
INDONESIA	514	392	76,3

Tabel 3.2.8 Proporsi Kabupaten/kota yang Melakukan Kampanye Peningkatan Perilaku Hidup Sehat Melalui Media Elektronik, Non Elektronik, dan Media Sosial menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Kab/kota melakukan kampanye peningkatan perilaku hidup sehat	
		n	%
Aceh	23	21	91,3
Sumatera Utara	33	27	81,8
Sumatera Barat	19	18	94,7
Riau	12	11	91,7
Jambi	11	11	100,0
Sumatera Selatan	17	16	94,1
Bengkulu	10	10	100,0
Lampung	15	15	100,0
Bangka Belitung	7	7	100,0
Kepulauan Riau	7	5	71,4
DKI Jakarta	6	6	100,0
Jawa Barat	27	25	92,6
Jawa Tengah	35	34	97,1
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	35	92,1
Banten	8	8	100,0
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	9	90,0
Nusa Tenggara Timur	22	17	77,3
Kalimantan Barat	14	14	100,0
Kalimantan Tengah	14	14	100,0
Kalimantan Selatan	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	5	100,0
Sulawesi Utara	15	14	93,3
Sulawesi Tengah	13	11	84,6
Sulawesi Selatan	24	21	87,5
Sulawesi Tenggara	17	16	94,1
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3
Maluku	11	7	63,6
Maluku Utara	10	8	80,0
Papua Barat	13	7	53,8
Papua	29	21	72,4
INDONESIA	514	461	89,7

Tabel 3.2.9 Kab/kota yang Memiliki Jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Jumlah Kab/Kota menjawab (n)	Kab/kota yang memiliki desa siaga aktif		Jumlah desa siaga aktif (n)
			n	%	
Aceh	23	22	18	81,8	3.270
Sumatera Utara	33	32	25	78,1	2.894
Sumatera Barat	19	19	19	100,0	1.373
Riau	12	11	11	100,0	1.344
Jambi	11	10	10	100,0	1.027
Sumatera Selatan	17	16	14	87,5	1.992
Bengkulu	10	10	10	100,0	1.027
Lampung	15	15	15	100,0	2.287
Bangka Belitung	7	7	5	71,4	292
Kepulauan Riau	7	7	7	100,0	416
DKI Jakarta	6	6	6	100,0	313
Jawa Barat	27	27	27	100,0	5.634
Jawa Tengah	35	35	35	100,0	7.684
DI Yogyakarta	5	5	5	100,0	406
Jawa Timur	38	38	38	100,0	8.020
Banten	8	8	8	100,0	1.181
Bali	9	9	9	100,0	716
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0	984
Nusa Tenggara Timur	22	21	19	90,5	1.227
Kalimantan Barat	14	14	13	92,9	1.045
Kalimantan Tengah	14	13	10	76,9	376
Kalimantan Selatan	13	13	11	84,6	1.316
Kalimantan Timur	10	8	8	100,0	523
Kalimantan Utara	5	5	4	80,0	115
Sulawesi Utara	15	14	12	85,7	835
Sulawesi Tengah	13	13	13	100,0	1.266
Sulawesi Selatan	24	23	23	100,0	2.488
Sulawesi Tenggara	17	15	15	100,0	1.127
Gorontalo	6	6	6	100,0	561
Sulawesi Barat	6	6	6	100,0	327
Maluku	11	11	10	90,9	765
Maluku Utara	10	10	9	90,0	604
Papua Barat	13	13	5	38,5	95
Papua	29	25	12	48,0	603
INDONESIA	514	497	448	90,1	54.133

Tabel 3.2.10 Proporsi Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Promosi Kesehatan dan Memiliki Tenaga Promosi Kesehatan menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Melakukan pelayanan promosi kesehatan		Memiliki tenaga program promkes	
		n	%	n	%
Aceh	347	346	99,7	322	92,8
Sumatera Utara	571	565	98,9	527	92,3
Sumatera Barat	271	271	100,0	252	93,0
Riau	216	216	100,0	202	93,5
Jambi	193	193	100,0	179	92,7
Sumatera Selatan	328	327	99,7	322	98,2
Bengkulu	179	179	100,0	171	97,2
Lampung	299	299	100,0	279	93,3
Bangka Belitung	63	63	100,0	62	98,4
Kepulauan Riau	80	79	98,8	73	91,3
DKI Jakarta	313	312	99,7	271	86,6
Jawa Barat	1.069	1.067	99,8	1.021	95,5
Jawa Tengah	876	875	99,9	852	97,3
DI Yogyakarta	121	121	100,0	121	100,0
Jawa Timur	964	957	99,3	925	96,0
Banten	233	231	99,1	225	96,6
Bali	120	120	100,0	119	99,2
Nusa Tenggara Barat	161	161	100,0	159	98,8
Nusa Tenggara Timur	374	374	100,0	355	94,9
Kalimantan Barat	241	238	98,8	227	94,2
Kalimantan Tengah	197	194	98,5	179	90,9
Kalimantan Selatan	232	232	100,0	221	95,3
Kalimantan Timur	178	177	99,4	165	92,7
Kalimantan Utara	55	55	100,0	53	96,4
Sulawesi Utara	193	192	99,5	185	95,9
Sulawesi Tengah	196	194	99,0	189	96,4
Sulawesi Selatan	452	452	100,0	433	95,8
Sulawesi Tenggara	281	279	99,3	268	95,4
Gorontalo	93	93	100,0	90	96,8
Sulawesi Barat	94	94	100,0	90	95,7
Maluku	199	191	96,0	177	88,9
Maluku Utara	129	127	98,4	120	93,0
Papua Barat	157	147	93,6	123	78,3
Papua	356	293	82,3	200	56,2
INDONESIA	9.831	9.714	98,8	9.157	93,2

Tabel 3.2.11 Proporsi Kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Surveilans Gizi menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Menyelenggarakan surveilans gizi	
		n	%
Aceh	23	22	95,7
Sumatera Utara	33	32	97,0
Sumatera Barat	19	19	100,0
Riau	12	10	83,3
Jambi	11	10	90,9
Sumatera Selatan	17	17	100,0
Bengkulu	10	10	100,0
Lampung	15	14	93,3
Bangka Belitung	7	7	100,0
Kepulauan Riau	7	7	100,0
DKI Jakarta	6	6	100,0
Jawa Barat	27	27	100,0
Jawa Tengah	35	34	97,1
DI Yogyakarta	5	5	100,0
Jawa Timur	38	38	100,0
Banten	8	7	87,5
Bali	9	9	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	20	90,9
Kalimantan Barat	14	13	92,9
Kalimantan Tengah	14	13	92,9
Kalimantan Selatan	13	13	100,0
Kalimantan Timur	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	4	80,0
Sulawesi Utara	15	15	100,0
Sulawesi Tengah	13	12	92,3
Sulawesi Selatan	24	23	95,8
Sulawesi Tenggara	17	17	100,0
Gorontalo	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	5	83,3
Maluku	11	9	81,8
Maluku Utara	10	10	100,0
Papua Barat	13	12	92,3
Papua	29	25	86,2
INDONESIA	514	491	95,5

Tabel 3.2.12 Proporsi Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Gizi menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Puskesmas N	Pelayanan gizi	
		n	%
Aceh	347	338	97,4
Sumatera Utara	571	551	96,5
Sumatera Barat	271	265	97,8
Riau	216	211	97,7
Jambi	193	192	99,5
Sumatera Selatan	328	319	97,3
Bengkulu	179	174	97,2
Lampung	299	292	97,7
Bangka Belitung	63	63	100,0
Kepulauan Riau	80	79	98,8
DKI Jakarta	313	284	90,7
Jawa Barat	1.069	1.044	97,7
Jawa Tengah	876	866	98,9
DI Yogyakarta	121	121	100,0
Jawa Timur	964	950	98,5
Banten	233	229	98,3
Bali	120	120	100,0
Nusa Tenggara Barat	161	160	99,4
Nusa Tenggara Timur	374	371	99,2
Kalimantan Barat	241	237	98,3
Kalimantan Tengah	197	190	96,4
Kalimantan Selatan	232	230	99,1
Kalimantan Timur	178	177	99,4
Kalimantan Utara	55	52	94,5
Sulawesi Utara	193	184	95,3
Sulawesi Tengah	196	190	96,9
Sulawesi Selatan	452	451	99,8
Sulawesi Tenggara	281	270	96,1
Gorontalo	93	91	97,8
Sulawesi Barat	94	93	98,9
Maluku	199	188	94,5
Maluku Utara	129	129	100,0
Papua Barat	157	150	95,5
Papua	356	290	81,5
INDONESIA	9.831	9.551	97,2

Tabel 3.2.13 Distribusi Kabupaten/kota yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah kab/kota N	Kab/kota melakukan kegiatan n	pencegahan dan pengendalian penularan hepatitis B dari ibu ke anak	
			n	%
Aceh	23	20	15	75,0
Sumatera Utara	33	10	7	70,0
Sumatera Barat	19	17	16	94,1
Riau	12	7	5	71,4
Jambi	11	7	6	85,7
Sumatera Selatan	17	11	10	90,9
Bengkulu	10	6	6	100,0
Lampung	15	13	13	100,0
Bangka Belitung	7	6	4	66,7
Kepulauan Riau	7	6	5	83,3
DKI Jakarta	6	6	5	83,3
Jawa Barat	27	19	18	94,7
Jawa Tengah	35	31	21	67,7
DI Yogyakarta	5	4	4	100,0
Jawa Timur	38	37	30	81,1
Banten	8	8	6	75,0
Bali	9	7	6	85,7
Nusa Tenggara Barat	10	10	8	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	13	8	61,5
Kalimantan Barat	14	11	8	72,7
Kalimantan Tengah	14	12	9	75,0
Kalimantan Selatan	13	13	10	76,9
Kalimantan Timur	10	10	10	100,0
Kalimantan Utara	5	4	3	75,0
Sulawesi Utara	15	14	11	78,6
Sulawesi Tengah	13	12	12	100,0
Sulawesi Selatan	24	22	17	77,3
Sulawesi Tenggara	17	10	6	60,0
Gorontalo	6	6	6	100,0
Sulawesi Barat	6	3	2	66,7
Maluku	11	4	2	50,0
Maluku Utara	10	7	7	100,0
Papua Barat	13	4	4	100,0
Papua	29	11	6	54,5
INDONESIA	514	381	306	80,3

Tabel 3.2.14 Distribusi Kabupaten/kota yang Memiliki 80% Desa Berposbindu menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Kab/kota dengan desa berposbindu n	Memiliki 80% desa/kelurahan berposbindu	
			n	%
Aceh	23	23	7	30,4
Sumatera Utara	33	33	7	21,2
Sumatera Barat	19	19	8	42,1
Riau	12	12	3	25,0
Jambi	11	11	5	45,5
Sumatera Selatan	17	17	6	35,3
Bengkulu	10	10	6	60,0
Lampung	15	15	3	20,0
Bangka Belitung	7	7	6	85,7
Kepulauan Riau	7	7	3	42,9
DKI Jakarta	6	6	5	83,3
Jawa Barat	27	27	15	55,6
Jawa Tengah	35	35	9	25,7
DI Yogyakarta	5	5	3	60,0
Jawa Timur	38	38	12	31,6
Banten	8	8	3	37,5
Bali	9	9	4	44,4
Nusa Tenggara Barat	10	10	8	80,0
Nusa Tenggara Timur	22	22	4	18,2
Kalimantan Barat	14	14	5	35,7
Kalimantan Tengah	14	14	2	14,3
Kalimantan Selatan	13	13	4	30,8
Kalimantan Timur	10	10	6	60,0
Kalimantan Utara	5	5	1	20,0
Sulawesi Utara	15	15	7	46,7
Sulawesi Tengah	13	13	6	46,2
Sulawesi Selatan	24	24	15	62,5
Sulawesi Tenggara	17	17	9	52,9
Gorontalo	6	6	5	83,3
Sulawesi Barat	6	6	3	50,0
Maluku	11	11	1	9,1
Maluku Utara	10	10	2	20,0
Papua Barat	13	10	0	0,0
Papua	29	20	0	0,0
INDONESIA	514	502	183	36,5

Tabel 3.2.15 Distribusi Puskesmas yang melakukan Pemeriksaan IVA menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah puskesmas N	Puskesmas yang melakukan pemeriksaan IVA	
		n	%
Aceh	347	207	59,7
Sumatera Utara	571	427	74,8
Sumatera Barat	271	258	95,2
Riau	216	199	92,1
Jambi	193	182	94,3
Sumatera Selatan	328	313	95,4
Bengkulu	179	161	89,9
Lampung	299	285	95,3
Bangka Belitung	63	63	100,0
Kepulauan Riau	80	72	90,0
DKI Jakarta	313	301	96,2
Jawa Barat	1.069	870	81,4
Jawa Tengah	876	744	84,9
DI Yogyakarta	121	120	99,2
Jawa Timur	964	871	90,4
Banten	233	218	93,6
Bali	120	117	97,5
Nusa Tenggara Barat	161	139	86,3
Nusa Tenggara Timur	374	283	75,7
Kalimantan Barat	241	179	74,3
Kalimantan Tengah	197	144	73,1
Kalimantan Selatan	232	228	98,3
Kalimantan Timur	178	153	86,0
Kalimantan Utara	55	48	87,3
Sulawesi Utara	193	109	56,5
Sulawesi Tengah	196	187	95,4
Sulawesi Selatan	452	365	80,8
Sulawesi Tenggara	281	200	71,2
Gorontalo	93	71	76,3
Sulawesi Barat	94	64	68,1
Maluku	199	103	51,8
Maluku Utara	129	65	50,4
Papua Barat	157	64	40,8
Papua	356	85	23,9
INDONESIA	9.831	7.895	80,3

**Tabel 3.2.16 Distribusi Kabupaten/kota yang Mempunyai Kebijakan
Kekarantinaan Kesehatan menurut Provinsi, Rifaskes 2019**

Provinsi	Jumlah Kab/Kota N	Mempunyai kebijakan kekarantinaan kesehatan	
		n	%
Aceh	23	1	4,3
Sumatera Utara	33	0	0,0
Sumatera Barat	19	2	10,5
Riau	12	2	16,7
Jambi	11	1	9,1
Sumatera Selatan	17	2	11,8
Bengkulu	10	2	20,0
Lampung	15	0	0,0
Bangka Belitung	7	1	14,3
Kepulauan Riau	7	3	42,9
DKI Jakarta	6	2	33,3
Jawa Barat	27	4	14,8
Jawa Tengah	35	8	22,9
DI Yogyakarta	5	1	20,0
Jawa Timur	38	3	7,9
Banten	8	1	12,5
Bali	9	1	11,1
Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0
Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0
Kalimantan Barat	14	1	7,1
Kalimantan Tengah	14	1	7,1
Kalimantan Selatan	13	1	7,7
Kalimantan Timur	9	1	11,1
Kalimantan Utara	5	0	0,0
Sulawesi Utara	15	2	13,3
Sulawesi Tengah	13	3	23,1
Sulawesi Selatan	24	4	16,7
Sulawesi Tenggara	17	2	11,8
Gorontalo	6	0	0,0
Sulawesi Barat	6	0	0,0
Maluku	11	1	9,1
Maluku Utara	10	1	10,0
Papua Barat	13	1	7,7
Papua	29	3	10,3
INDONESIA	513	55	10,7

Tabel 3.2.17 Proporsi Kabupaten/kota yang 10 %Puskesmasnya Melaksanakan Upaya P2 Keswa dan Napza menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Kab/kota dengan 10% puskesmas melaksanakan upaya keswa dan napza		
		Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
Aceh	23	91,3	100,0	100,0
Sumatera Utara	33	84,8	100,0	97,0
Sumatera Barat	19	94,7	100,0	100,0
Riau	12	91,7	100,0	100,0
Jambi	11	90,9	100,0	100,0
Sumatera Selatan	17	100,0	100,0	100,0
Bengkulu	10	80,0	100,0	100,0
Lampung	15	80,0	100,0	100,0
Kep. Bangka Belitung	7	100,0	100,0	100,0
Kep. Riau	7	28,6	100,0	100,0
DKI Jakarta	6	66,7	100,0	100,0
Jawa Barat	27	81,5	100,0	100,0
Jawa Tengah	35	80,0	100,0	100,0
DI Yogyakarta	5	100,0	100,0	100,0
Jawa Timur	38	89,5	100,0	100,0
Banten	8	87,5	100,0	100,0
Bali	9	55,6	100,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	90,0	100,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	36,4	100,0	81,8
Kalimantan Barat	14	64,3	100,0	100,0
Kalimantan Tengah	14	64,3	100,0	100,0
Kalimantan Selatan	13	84,6	100,0	100,0
Kalimantan Timur	10	100,0	100,0	100,0
Kalimantan Utara	5	80,0	100,0	100,0
Sulawesi Utara	15	60,0	100,0	100,0
Sulawesi Tengah	13	84,6	100,0	100,0
Sulawesi Selatan	24	83,3	100,0	100,0
Sulawesi Tenggara	17	64,7	100,0	100,0
Gorontalo	6	100,0	100,0	100,0
Sulawesi Barat	6	83,3	100,0	100,0
Maluku	11	45,5	90,9	90,9
Maluku Utara	10	80,0	100,0	100,0
Papua Barat	13	0,0	76,9	30,8
Papua	29	17,2	75,9	44,8
INDONESIA	514	73,7	97,9	94,0

Keterangan :

- Tipe 1 yaitu kabupaten kota yang 10% puskesmasnya melaksanakan minimal 1 upaya keswa dan 1 upaya Napza
- Tipe 2 yaitu kabupaten kota yang 10% puskesmasnya melaksanakan minimal 1 upaya keswa atau 1 upaya Napza
- Tipe 2 yaitu kabupaten kota yang 10% puskesmasnya melaksanakan minimal 3 upaya keswa atau 3 upaya Napza

Tabel 3.2.18 Proporsi Kabupaten/kota yang 20 % Puskesmasnya Melaksanakan Upaya P2 Keswa dan Napza menurut Provinsi, Rifaskes 2019

Provinsi	Jumlah Kab/kota N	Kab/kota dengan 20% puskesmas melaksanakan upaya keswa dan napza		
		Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
Aceh	23	73,9	100,0	95,7
Sumatera Utara	33	66,7	100,0	93,9
Sumatera Barat	19	84,2	100,0	100,0
Riau	12	58,3	100,0	100,0
Jambi	11	81,8	100,0	100,0
Sumatera Selatan	17	88,2	100,0	100,0
Bengkulu	10	60,0	100,0	100,0
Lampung	15	53,3	100,0	100,0
Kep. Bangka Belitung	7	71,4	100,0	100,0
Kep. Riau	7	28,6	100,0	100,0
DKI Jakarta	6	33,3	100,0	100,0
Jawa Barat	27	59,3	100,0	100,0
Jawa Tengah	35	37,1	100,0	100,0
DI Yogyakarta	5	60,0	100,0	100,0
Jawa Timur	38	73,7	100,0	100,0
Banten	8	62,5	100,0	100,0
Bali	9	0,0	100,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	10	60,0	100,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	22	9,1	100,0	72,7
Kalimantan Barat	14	50,0	100,0	100,0
Kalimantan Tengah	14	50,0	100,0	100,0
Kalimantan Selatan	13	61,5	100,0	100,0
Kalimantan Timur	10	90,0	100,0	100,0
Kalimantan Utara	5	40,0	100,0	100,0
Sulawesi Utara	15	33,3	100,0	100,0
Sulawesi Tengah	13	61,5	100,0	100,0
Sulawesi Selatan	24	50,0	100,0	100,0
Sulawesi Tenggara	17	29,4	100,0	94,1
Gorontalo	6	66,7	100,0	100,0
Sulawesi Barat	6	66,7	100,0	100,0
Maluku	11	18,2	90,9	81,8
Maluku Utara	10	40,0	100,0	100,0
Papua Barat	13	0,0	76,9	7,7
Papua	29	13,8	65,5	24,1
INDONESIA	514	51,2	97,3	91,1

Keterangan :

- Tipe 1 yaitu kabupaten kota yang 20% puskesmasnya melaksanakan minimal 1 upaya keswa dan 1 upaya Napza
- Tipe 2 yaitu kabupaten kota yang 20% puskesmasnya melaksanakan minimal 1 upaya keswa atau 1 upaya Napza
- Tipe 2 yaitu kabupaten kota yang 20% puskesmasnya melaksanakan minimal 3 upaya keswa atau 3 upaya Napza

Lampiran:

- 1.SK Menkes Nomor
HK.01.07/Menkes/275/2019**
- 2.SK Kepala Badan Litbangkes Nomor
HK.02.02/I/3450/2019**
- 3.Persetujuan Etik Rifaskes 2019**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/275/2019
TENTANG
TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk penguatan pencapaian *Universal Health Coverage* serta perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 yang efektif, efisien, terpadu dan terintegrasi di tingkat pusat dan daerah perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/PER/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk Menandatangani Surat Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019.
- KESATU : Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 selanjutnya disebut Tim Rifaskes;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Risfakes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasehat, Penanggung Jawab, Pengarah, Pakar, Pelaksana Pusat, dan Pelaksana wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Tim Rifaskes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penasehat bertugas:
 - a. memberikan nasehat, saran, dan pertimbangan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
 - b. menetapkan kebijakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

2. Penanggung Jawab bertugas:

- a. menetapkan metodologi penelitian;
- b. menetapkan Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- c. bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- d. mengusulkan rekomendasi kebijakan atas hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

3. Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat persiapan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab terkait dengan metodologi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Riset Fasilitas Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

4. Pakar bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memberikan masukan terkait aspek ilmiah dari proposal, protokol, pelaksanaan, analisis data, diseminasi dan utilisasi hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- b. memberikan rekomendasi agar kaidah ilmiah dari Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 tetap ditegakkan.

5. Pelaksana Pusat bertugas:

a. Bidang Teknis:

- 1) melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen kuesioner, pedoman teknis, konsultasi dan diskusi dengan pakar, serta pelaksanaan uji coba instrumen kuesioner;
- 2) menyusun rencana kerja penelitian;
- 3) menyusun metodologi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 4) menyusun protokol;
- 5) menyusun mekanisme kerja pengumpulan data;

- 6) melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 7) melaksanakan workshop untuk penanggung jawab teknis provinsi dan kabupaten/kota;
- 8) melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari persiapan sampai analisis dan pelaporan;
- 9) melakukan diseminasi dan utilisasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 10) menyusun laporan kegiatan;
- 11) melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 kepada Penanggung jawab dan Pengarah; dan
- 12) mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggung jawab dan Pengarah.

b. Bidang Pengelolaan Data bertugas:

- 1) membuat aplikasi *entry* untuk data Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 2) membuat aplikasi pemantauan proses pengumpulan data;
- 3) melatih pelaksana pusat bidang teknis dan/atau penanggung jawab teknis provinsi untuk penggunaan aplikasi pengolahan data;
- 4) menerima dan melakukan pemantauan *raw data*;
- 5) melakukan validasi *raw data* yang diterima dari enumerator Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 6) melakukan pembersihan *raw data* gabungan hasil validasi;
- 7) melakukan analisis data bersama dengan pelaksana pusat bidang teknis; dan
- 8) menyerahkan *raw data final* ke Laboratorium Manajemen Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

c. Bidang Manajemen bertugas:

- 1) melakukan perencanaan bidang manajemen Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 2) melakukan pengorganisasian Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 3) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 4) melakukan rekrutmen tenaga pengajar, penanggung jawab teknis provinsi;
- 5) memberikan dukungan administrasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 6) melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan tata usaha Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- 7) melakukan perencanaan anggaran;
- 8) melakukan pengorganisasian keuangan, logistik, sumber daya manusia dan administrasi lainnya;
- 9) melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan
- 10) melakukan penyiapan, pendistribusian dan penyimpanan logistik Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

d. Pelaksana wilayah bertugas:

- 1) menyusun rencana kerja dan pedoman kerja pelaksana wilayah;
- 2) merekrut enumerator;
- 3) berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
- 4) melakukan pelatihan bagi enumerator;
- 5) melakukan pengumpulan dan pengolahan data;
- 6) melakukan pengawasan pelaksanaan enumerator;
- 7) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Provinsi, Workshop pengumpulan data;
- 8) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019; dan

9) menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim Rifaskes bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan, Tim Rifaskes dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana pusat dan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KETUJUH : Masa penugasan Tim Rifaskes sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KEDELAPAN : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan sebagaimana dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



Nila Farid Moeloek
NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR EK.01.07/Menkes/275/2019
TENTANG TIM RISET FASILITAS
KESEHATAN TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

- A. PENASEHAT : Menteri Kesehatan
- B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- C. PENGARAH : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- D. PAKAR :
Ketua : Dr. dr. Trihono, M. Sc.
Anggota : 1. Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH
2. Prof. dr. Hasbullah Thabarany, MPH, Dr.PH
3. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D
4. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
5. Prof. dr. Lestari Handayani, M.Med
6. Prof. Budi Hidayat, SKM., MPPM, Ph.D
7. Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K)
8. Prof. Dr. Drs. Sudibyso Soepardi, M.Kes, Apt
9. Prof. Dr. drg. Niniek Lely Pratiwi, M.Kes
10. Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, DrPH
11. dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD

12. Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P., MARS
13. dr. Tonang D Ardiyanto, SpPK, Ph.D
14. Dr. Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes
15. Dr. Drs. Chazali Situmorang, Apt, M.Sc
16. Dr. Drs. Tris Eryando, MA
17. Prastuti Soewondo, SE, MPH., Ph.D
18. dr. Soewarto Kosen, MPH., Dr.PH
19. dr. Widodo JP, MS, MPH, Dr.PH
20. dr. Untung Suseno, M.Kes, AKAU
21. drg. Usman Sumantri, M.Sc
22. dr. Eka Viora, SpKJ

E. PELAKSANA PUSAT

Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Sekretaris : 1. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
2. Tinexcellly Marisiuli Simamora, SKM, MKM

a. Bidang Teknis

Ketua Bidang Teknis : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes

Wakil Ketua Bidang
teknis : Yuyun Yuniar, S.Si., Apt., MA

Sekretaris Bidang
teknis : 1. Mujiati, SKM., MKes
2. Rani Marsini, SKM

1. Koordinator Blok
Pelayanan
Kesehatan : dr. Fitriana, Sp.MK

2. Koordinator Blok
Sistem Informasi : Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes

3. Koordinator Blok
Kepesertaan : Dr. Lukman Waris, SKM., MMR., M.Kes

4. Koordinator Blok
Pembiayaan : drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS

5. Koordinator Blok
Farmasi dan Alat
Kesehatan : Anggita Bunga Anggraini, S.Farm., Apt., MKM

6. Koordinator Blok
Tata Kelola : dr. Roy G.A Massie, MPH, PhD

b. Bidang Pengelolaan

Data

Ketua Bidang : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes

Pengelolaan Data

c. Bidang Manajemen

1. Ketua Bidang : Kepala Bagian Program dan Informasi
Manajemen

2. Ketua Sub Bidang : Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik
Keuangan dan Negara
Logistik

3. Ketua Sub Bidang : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan
Hukum, Kepegawaian
Organisasi dan
Kepegawaian

4. Ketua Sub Bidang : Kepala Bagian Umum, Dokumentasi dan
Umum, Jejaring
Dokumentasi dan
Jejaring

5. Ketua Sub Bidang : Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM, M.Ak
Keseekretariatan

F. PELAKSANA WILAYAH

Ketua : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan

a. Wilayah I

Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Wakil Koordinator : 1. Dr. Dra. Raharni, Apt., M.Kes

Wilayah : 2. Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

b. Wilayah II

Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

Wakil Koordinator Wilayah : Dr. dr. Felly Philipus Senewe, M.Kes.

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

c. Wilayah III

Koordinator Wilayah : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Wakil Koordinator Wilayah : dr. Trijuni Angkaswati, M.Sc.

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

d. Wilayah IV

Koordinator Wilayah : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu

Wakil Koordinator Wilayah : Junediyono, SKM, MKM

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

e. Wilayah V

Koordinator Wilayah : Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga

Wakil Koordinator Wilayah : dr. Bagus Febrianto, M.Sc

Anggota Wilayah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

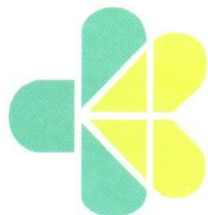
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,



NILA FARID MOELOEK



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/I/3450/2019

TENTANG

PELAKSANA RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk penguatan pencapaian *Universal Health Coverage* serta perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/275/2019 tentang Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, perlu dibentuk Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Pelaksana Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 681/Menkes/PER/VI/2010 tentang Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/275/2019 tentang Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PELAKSANA RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019.

- KESATU : Pelaksana Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Pelaksana Rifaskes terdiri atas Pelaksana Pusat dan Pelaksana Wilayah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Bidang Teknis, Bidang Data dan Bidang Manajemen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat/Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEEMPAT : Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Teknis:
 1. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari membahas tema, sub-tema, menyusun instrumen kuesioner, pedoman teknis, konsultasi dan diskusi dengan pakar, serta pelaksanaan uji coba instrumen kuesioner;
 2. menyusun rencana kerja penelitian;
 3. menyusun metodologi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 4. menyusun protokol;
 5. menyusun mekanisme kerja pengumpulan data;
 6. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 7. melaksanakan *workshop* untuk penanggung jawab teknis provinsi dan kabupaten/kota;
 8. melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, mulai dari persiapan sampai analisis data dan pelaporan;
 9. melakukan diseminasi dan utilisasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 10. menyusun laporan kegiatan;
 11. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengelolaan dan analisis data serta evaluasi hasil persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan 2019 kepada Penanggung jawab dan Pengarah Riset Fasilitas Kesehatan 2019; dan
 12. mengusulkan rekomendasi teknis kepada Penanggung jawab dan Pengarah Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.
 - b. Bidang Pengelolaan Data
 1. membuat aplikasi *entry* untuk data Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
 2. membuat aplikasi pemantauan proses pengumpulan data;

3. melatih pelaksana pusat bidang teknis dan/atau penanggung jawab teknis provinsi untuk penggunaan aplikasi pengolahan data;
4. menerima dan melakukan pemantauan raw data;
5. melakukan validasi raw data yang diterima dari enumerator Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
6. melakukan pembersihan raw data gabungan hasil validasi;
7. melakukan analisis data bersama dengan pelaksana pusat bidang teknis; dan
8. menyerahkan *raw* data final ke Laboratorium Manajemen Data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

c. Bidang Manajemen

1. melakukan perencanaan bidang manajemen Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
2. melakukan pengorganisasian Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
3. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum terkait dengan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
4. melakukan rekrutmen tenaga pengajar, penanggung jawab teknis provinsi;
5. memberikan dukungan administrasi Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
6. melakukan pengelolaan administrasi, arsip dan tata usaha Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019;
7. melakukan perencanaan anggaran;
8. melakukan pengorganisasian keuangan, logistik, sumber daya manusia dan administrasi lainnya;
9. melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan dokumentasi dan diseminasi hasil Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 ; dan
10. melakukan penyiapan, pendistribusian dan penyimpanan logistik Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019.

- KELIMA** : Dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli dan tenaga administrasi umum untuk persiapan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019, Pelaksana Rifaskes dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pelaksana Rifaskes bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan akhir penelitian;
- KEEMPAT** : Masa tugas Pelaksana Rifaskes selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

- KELIMA Pendanaan dari pelaksanaan kegiatan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



SISWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/3450/2019
TENTANG PELAKSANA RISET FASILITAS
KESEHATAN 2019

SUSUNAN PELAKSANA PUSAT RISET FASILITAS KESEHATAN 2019

- Ketua : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
- Sekretaris : 1. dr. Muhammad Karyana, M.Kes
2. Tinexcellly Marisiuli Simamora, SKM,
MKM
- A. Bidang Teknis
- Ketua Bidang Teknis : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
- Wakil ketua Bidang teknis : Yuyun Yuniar, S.Si., Apt., MA
- Sekretaris Bidang teknis : 1. Mujiati, SKM., MKes
2. Rani Marsini, SKM
- a. Blok Pelayanan
Kesehatan
- Koordinator : dr. Fitriana, Sp.MK
- Anggota : 1. Dr. dr. Telly Purnamasari Agus, M.Epid
2. Dr. dr. Laurentia Konadi, MS., Sp.GK
3. dr. Made Dewi Susilawati, M.Epid.
4. dr. Srilaning Driyah, Sp.PK, M.Si.Med
5. dr. Eva Sulistiowati, M.Biomed
6. dr. Lusianawaty Tana, MS., Sp.OK
7. dr. Tetra Fajarwati, M.Gizi
8. drg. Lelly Andayasari, M.Kes
9. drh. Risqa Novita, MKM
10. drg. Rafni Pamela Sari, MARS
11. dr. Rossa Avrina, M.Epid
12. dr. Hadjar Siswantoro, M.Sc
13. dr. Monika Saraswati Sitepu, M.Sc
14. drg. Indra Rachmad Dharmawan, MKM
15. Dra. Marice Sihombing, M.Si
16. Reni Oktavia, SKM., MKM

- b. Blok Sistem Informasi
Koordinator : Dr. Maria Holly Herawati, SKM., M.Kes
Anggota : 1. Dr. dr. Sri Idaiani, Sp.KJ
2. Noor Edi Widya Sukoco, MPS., M.Sc.PH
3. Asep Hermawan, S.Kep., Ners, MPH
4. Syachroni, S.Si, M.Kes
- c. Blok Kepesertaan
Koordinator : Dr. Lukman Waris, SKM., MMR., M.Kes
Anggota : 1. Aris Yulianto, S.Si
2. Agus Dwi Harso, S.Si
3. Desi Fitriani, SKM, M.Si
4. Sundari Wirasmi, S.Si
5. dr. Sri Mardikani Nugraha, MKM
6. dr. Anton Suryatma, MKM
7. Heny Lestary, SKM, MKM
8. Miko Hananto, M.Kes
9. dr. Igan Aprianti
10. Timor Utama, S.Kom., MMSI
- d. Blok Pembiayaan
Koordinator : drg. Hendrianto T. Wibowo, MARS
Anggota : 1. dr. Retna Mustika Indah, MKM
2. dr. Tita Rosita, MKM
3. Andi Leny Susyanty, S.Si., Apt, MKM
4. dr. Idawaty Muas, MKM
5. dr. Cicuh Opitasari, MARS
6. Mimi Sumiarsih, SKM, MKM
7. Rozana Ika A. S.Psi, M.Psi T
8. drg. Doni Arianto, MKM.
- e. Blok Farmasi dan Alat Kesehatan :
Koordinator : Anggita Bunga Anggraini, S.Farm., Apt., MKM
Anggota : 1. Ida Diana Sari, S.Si., Apt., MPH
2. Drs. Max Josep Herman, M.Kes
3. Dra. Rini Sasanti Handayani, Apt., M.Kes
4. Dra. Retno Gitawati, Apt., MS
5. Nita Prihartini, SKM
6. Bryan Mario Isakh, SKM, MKM
7. Harwati Nana Andini, S.Si., Apt., MPH
8. Sri Suratini, S.Si., Apt., M.Farm
- f. Blok Tata Kelola
Koordinator : dr. Roy G.A Massie, MPH, PhD
Anggota : 1. Enung Nurhotimah, SKM, MKM
2. Meda Permana, S.Sos, M.Si
3. Dr. Feri Ahmadi, S.Si, MPH
4. Dr. Gurendro Putro, SKM, M.Kes

B. Bidang Pengelolaan Data

Ketua

Anggota

- : Dr. Dwi Hapsari Tjandrarini, SKM, M.Kes
- : 1. Dr. Frans Dany
2. Dr. Nurhayati, SKM, MKM
3. Puti Sari Hidayangsih, SKM., M.Sc. PH
4. Olwin Nainggolan, S.Si, MKM
5. Lely Indrawati, S.Sos., MKM
6. Ika Dharmayanti, SKM, M.Env
7. Astridya Paramitha, SKM, M.Kes
8. Lusi Kristina, S.Si, M.Kes, Apt
9. Antonius Yudi Kristanto, SKM., M.Kes
10. Totih Ratna Sondari Setiadi, SKM
11. Amir Suudi, SKM, MKM
12. Bhakti Samsu Adi, M.Si
13. Merry Budiarti S, M.Sc
14. Dwi Priyanto, S.Si, M.Si
15. Made Agus Nurjana SKM, M.Epid
16. Asmaul Husna, SKM, MPH
17. Zain Hadifah, SKM, M.Sc
18. Ina Kusriani, SKM, MKM
19. Eddy Purwanto, ST, MKM
20. Mara Ipa, SKM, M.Sc.
21. Rianto Purnama, S.Kom
22. Zainul Khaqiqi Nantabah, S.Si
23. Yuniarti Suryatinah, S. Farm, Apt
24. Nur Rahmawati Wijaya, S.Si
25. Mutiara Widawati, S.Si
26. Akhmad Wahyudin, SKM
27. Zumrotus Sholichah, SKM
28. Nur Sholihatini, S.Sos
29. Tri Wurisastuti, S.Stat
30. Rika Mayasari, S.Si
31. Ritawati, S.Si
32. Yusup, S.Kom
33. Revi Rosavika Kinansi, S.Si
34. Fajar Sakti Prasetyawan, S.Si
35. Melda Suebu, S.Si
36. Windarti Fauziah, S.Si
37. Wening Widjajanti, SKM
38. Djunaedi, SKM
39. Narendro Arifia, S.Kom

C. Bidang Manajemen

1. Ketua Bidang
Manajemen

: Kepala Bagian Program dan Informasi

2. Ketua Sub Bidang
Keuangan dan Logistik
Anggota

: Kepala Bagian Keuangan dan Barang
Milik Negara

: 1. Sri Rahayu, S.Sos.M.M

2. Mustafa Arif, SKM., MKM
 3. Yuni Nuraini, SKM, MKM
 4. Soegeng Basoeki, SKM, M.Si.
 5. Ardi Purnomo, SE
 6. Meli Damayanti, SKM
 7. Saepullah, SE
 8. Ciptadi
 9. Subini
 10. Latifah
 11. Subagio
3. Ketua Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Kepegawaian Anggota : Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Kepegawaian
- : 1. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH
2. Indra Kurniawan, S.Kom., MKM
3. Dini Yulianti, S.Sos., MKM
4. Lintang Krina Ermaya, SH
5. Rahmadin Bagus Rafle Jalewangan, MH
4. Ketua Sub Bidang Umum, Dokumentasi dan Jejaring Anggota : Kepala Bagian Umum, Dokumentasi dan Jejaring
- : 1. Leny wulandari, SKM, MKM
2. Isminah, SKM, MAP.
3. Ahdiyati Firmana, S.Sn
5. Ketua Sub Bidang Sekretariat Anggota : Ida Ayu Made Rai Astuti, SKM, M.Ak
- : 1. Nurul Puspasari, SKM, MKM
2. Joni Pahridi, SE, MIP
3. Bayu Ari Bowo, SE, M.Ak
4. Melyana, SKM
5. Titin Delia, SKM
6. Deasy Pristi Retnani, Amd.Keb
7. Eka Sri Setyaningsih

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



SISWANTO



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226
Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933
Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



PERSETUJUAN AMANDEMEN PROTOKOL
PROTOCOL AMENDMENT APPROVAL

No. : LB.02.01/2/KE.011/2019

Ref. : Persetujuan/Approval no : LB.02.01/2/KE.318/2018 tanggal 16 November 2018

Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (KEPK-BPPK) dengan berdasarkan Deklarasi Helsinki, telah melakukan telaah, pembahasan dan penilaian melalui proses **Expedited**.

memutuskan amandemen protokol uji klinik yang berjudul :

Health Research Ethics Committee, National Institute of Health Research and Development (HREC-NIHRD), in accordance with Helsinki Declaration, has conducted a thorough Expedited review of research protocol amendment entitled :

"Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019 (Riset Evaluatif Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Semesta"

yang akan mengikutsertakan manusia sebagai partisipan/subyek penelitian; dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama :

in which will involve human participant(s), with Principal Investigator :

Dr. dr. Irmansyah, Sp.Kj(K)

sesuai surat pengantar no. LB.02.02/1/6518/2018 tanggal 16 Desember 2018, dapat diberikan persetujuan amandemen dengan masa berlaku :

has hereby declared the amendment is approved for implementation. This letter is valid from/to

21 Januari 2019 s/d 16 November 2019


Jika ada perubahan protokol (amandemen) dan/atau perpanjangan penelitian, Ketua Pelaksana/Peneliti Utama harus mengajukan kembali protokol versi terbaru untuk kaji etik penelitian. Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian juga harus diserahkan kepada KEPK-BPPK.

Should there be any modification (amendment) and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the latest version of protocol for approval. The final summary reports should also be submitted to HREC-NIHRD.

Chair of HREC-NIHRD :

Jakarta, 21 Januari 2019

Ketua
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Badan Litbang Kesehatan,


Prof. Dr. M. Sudomo



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
Jalan Percetakan Negara No. 29, Jakarta 10560
Telp. (021) 4261088 Fax. (021) 4243933